



RENCANA STRATEGIS 2015-2020



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

Oversight Committee

Jatna Supriatna	Ketua, Anggota Tetap	Conservation International
Novianto Bambang Wawandono	Anggota Tetap	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hartono	Anggota Alternatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bambang Dahono Aji	Anggota Alternatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Heather D'Agnes Gordon Church	Anggota Tetap Anggota Alternatif	USAID Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Erna Witoelar	Anggota Tetap	KEHATI
Hariadi Kartodiharjo	Anggota Alternatif	KEHATI
Tuti Hadiputranto	Anggota Tidak Tetap	Indonesia Business Link
Darusman Rusin	Anggota Tidak Tetap	Universitas Syiah Kuala
Rezki Sri Wibowo	Anggota Tidak Tetap	Transparency International-Indonesia
Rizal Edwin	Anggota Non-voting	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Ayu Sukorini	Anggota Non-voting	Kementerian Keuangan



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**CONSERVATION
INTERNATIONAL**



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

Indonesia Business Links



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



**UNIVERSITAS
SYIAH KUALA**



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption



**DEPARTEMEN
KEUANGAN RI**



**KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

Tentang TFCA-Sumatera



Pemerintah Amerika Serikat (USG), Pemerintah Indonesia (GOI), Yayasan KEHATI dan Conservation International (CI) menandatangani **tiga kesepakatan** pada tanggal 30 Juni 2009, yaitu ***Debt Swap Agreements*** antara GOI dan USG, mengenai pengalihan sejumlah utang luar negeri Indonesia kepada Amerika Serikat menjadi dana hibah bagi perlindungan, restorasi hutan tropis, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan di Pulau Sumatera; ***Swap Fee Agreement*** antara USG, CI dan KEHATI mengenai kontribusi kedua LSM dalam skema pengalihan utang dan memungkinkan keduanya menjadi swap partner; dan ***Forest Conservation Agreement*** antara Pemerintah Indonesia dengan CI dan KEHATI yang menjadi dasar implementasi program di tingkat tapak. Dana yang berasal dari pembayaran utang, dialihkan untuk mendukung kegiatan lembaga lokal dan organisasi lain yang mampu melaksanakan kegiatan konservasi di Pulau Sumatera. Program ini kemudian dinamai ***Tropical Forest Conservation Action for Sumatera*** (TFCA-Sumatera), aksi konservasi hutan tropis Sumatera. Program ini diarahkan oleh badan yang disebut sebagai ***Oversight Committee***, yang anggotanya terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat, CI dan KEHATI sebagai anggota tetap. Sedangkan anggota tidak tetap ***Oversight Committee*** berasal dari LSM dan lembaga lain, yaitu Indonesia Business Link (IBL), Universitas Syiah Kuala dan Transparency International-Indonesia. Pada tingkat pelaksana, sesuai dengan ***Forest Conservation Agreement***, KEHATI bertindak sebagai Administrator. Para pihak yang menandatangani perjanjian sepakat untuk mempercayakan HSBC Bank of Singapore untuk bertindak sebagai perwalian dana (*trustee*). Dari skema ini, akan terkumpul dana sejumlah US\$ 30 juta yang terdiri dari dana utama sejumlah US\$ 20 juta dan bunga sejumlah US\$ 10 juta selama periode 8 tahun.

Forest Conservation Agreement yang ditandatangani Pemerintah Indonesia, CI dan KEHATI merupakan dasar bagi implementasi program yang juga menjadi arahan bagi *Oversight Committee* dalam menjalankan peranan fidusiari dan bagi Administrator dalam mengelola dana serta menyalurkan hibah bagi kegiatan di lapangan. Keanggotaan *Oversight Committee* terdiri dari dua kategori, yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota Tetap terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat, CI dan KEHATI, sementara anggota tidak tetap memiliki masa selama 3 tahun terdiri dari perwakilan IBL, TI-Indonesia dan Universitas Syiah Kuala. Di masa mendatang, TFCA-Sumatera akan memperluas kelembagaannya dengan membentuk Fasilitator Wilayah yang akan mewakili Administrator dengan penunjukan melalui skema hibah. Fungsinya adalah untuk mendukung mitra penerima hibah TFCA melalui pendampingan, termasuk pengawasan proyek, peningkatan kapasitas dan fasilitasi jalinan hubungan dengan pemangku kepentingan.

Pada tanggal 29 September 2014, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk melakukan amandemen perjanjian kerjasama demi mengembangkan program TFCA-Sumatera. Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia menandatangani amandemen perjanjian pengalihan utang untuk lingkungan (*debt-for-nature swap agreement*) dibawah U.S. *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA) tahun 1998, yang menjadi dasar pengurangan kembali pembayaran utang Indonesia kepada Amerika dengan besaran mencapai \$12.6 juta selama tujuh tahun berikutnya. Dana tambahan ini bersumber dari pengalihan pembayaran utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat demi pelestarian jenis terancam punah, khususnya Badak Sumatra dan Harimau Sumatra serta habitatnya. Skema ini harus menjadi bagian dari hibah TFCA-Sumatera yang sedang berjalan,

sehingga pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat regional.

Pengembangan Program TFCA-Sumatera yang menitikberatkan pada perlindungan beberapa jenis terancam punah dan habitatnya, mengakibatkan pentingnya prioritas hibah berbasis bentang alam yang digunakan saat ini untuk terintegrasi dengan tujuan tersebut. Secara lebih terperinci, pengembangan hibah TFCA-Sumatera bertujuan untuk melindungi populasi Badak dan Harimau Sumatra dengan manfaat perlindungan yang sama bagi spesies lain, seperti Orangutan dan habitatnya. Tujuan ini sangat berkesesuaian dengan Rencana Strategis TFCA-Sumatera 2010-2015 dengan intervensi berbasis bentang alam dimana perlindungan terhadap spesies terancam punah berada dalam kerangka kegiatan konservasi habitat di kawasan prioritas.



Pengantar



Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk menyampaikan pengantar bagi Rencana Strategis TFCA-Sumatera periode 2015-2020.

Oversight Committee sangat menyadari tanggung jawab yang diemban untuk membangun visi dan arahan yang jelas bagi Administrator, Mitra Hibah, calon mitra potensial dan pemangku kepentingan lainnya dalam memasuki masa yang akan semakin menantang bagi TFCA-Sumatera. Rencana Strategis ini merupakan instrumen penting yang akan memandu kita dalam periode ini dan memastikan bahwa TFCA-Sumatera akan berkembang dan menjadi lebih kuat dengan reputasi yang semakin baik. Oleh karena itu, *Oversight Committee* menyetujui dan memberi dukungan penuh bagi visi baru yang tertuang dalam Rencana Strategis 2015-2020.

Menilik dari konteks sejarah, rencana strategis ini merupakan penanda yang sangat penting bagi TFCA-Sumatera yang akan memasuki periode lima tahun kedua pada tahun ini dengan tantangan yang semakin beragam. TFCA-Sumatera harus berhadapan dengan persoalan mendasar konservasi hutan Sumatera saat ini, sehingga dibutuhkan panduan yang kuat secara prinsip, dimana langkah intervensi harus dilakukan

pada tiga level, yaitu kebijakan dan kelembagaan; bentang alam; dan masyarakat lokal. Selain itu, TFCA-Sumatera akan menerapkan kebijakan hibah baru, dimana konservasi spesies terancam punah akan menjadi salah satu dasar intervensi, bersama dengan upaya konservasi berbasis bentang alam. Demi menjawab kebutuhan lembaga lokal dan organisasi lain yang memenuhi persyaratan dalam rangka mengatasi permasalahan dan mencapai target konservasi TFCA-Sumatera, telah dibangun strategi hibah yang lebih fleksibel. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menjaga reputasi TFCA-Sumatera yang hanya dapat dipenuhi melalui praktik tata kelola yang baik; kepercayaan bahwa TFCA-Sumatera mampu membangun bentang alam hutan tropis Sumatera menjadi lebih baik; komitmen terhadap komunitas lokal; dan mengakui tanggung jawab kita terhadap generasi Indonesia mendatang. *Oversight Committee*, menyambut baik penegasan kembali prinsip-prinsip pembinaan tersebut dalam konteks konservasi hutan Sumatera terkini.

Oversight Committee mendukung sepenuhnya Administrator TFCA-Sumatera dalam menjalankan rencana ini. Selanjutnya, *Oversight Committee* akan menjalankan perannya untuk mengawasi perkembangan implementasi kegiatan demi kesigapan mempertahankan akuntabilitas. *Oversight Committee* akan memastikan bahwa TFCA-Sumatera memberi manfaat yang berkelanjutan dengan memberi kontribusi melalui tata kelola yang transparan dan efektif.

Saya menatap masa mendatang dengan penuh kepercayaan diri, dengan keyakinan bahwa TFCA-Sumatera memasuki periode yang penting dalam upaya pemulihan keanekaragaman hayati, mempertahankan serapan karbon dan membalik laju kehilangan tutupan hutan Sumatera.

Jatna Supriatna
Ketua *Oversight Committee*

Daftar Isi

<i>Oversight Committee</i>	<i>i</i>
<i>Tentang TFCA-Sumatera</i>	<i>iii</i>
<i>Pengantar</i>	<i>vii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ix</i>
<i>Ringkasan Eksekutif</i>	<i>xiii</i>
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Arti Penting Hutan Sumatera bagi Konservasi	5
1.2.1. Penurunan Tutupan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang di Luar Dugaan	5
1.2.2. Penurunan Populasi Spesies Karismatik Sumatera	8
1.3. Mandat Tambahan untuk Konservasi Spesies Terancam Punah	15
Bab 2 PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI PROGRAM 2010-2015	17
2.1. Tahap Awal TFCA-Sumatera	19
2.2. Penyaluran Hibah TFCA-Sumatera Saat ini dan Capaian Lainnya	20
2.2.1. Pemberian Hibah	20
2.2.2. Capaian	23
2.3. Tantangan dan Peluang	28
2.3.1. Tantangan	28
2.3.2. Peluang	30

Bab 3 VISI, MISI DAN TUJUAN	33
3.1. Visi	35
3.2. Misi	35
3.3. Isu-isu yang Harus Dihadapi	35
3.4. Tujuan	37
3.5. Level Intervensi	38
Bab 4 ARAHAN RENCANA STRATEGIS 2015-2020	49
4.1. Arahan Umum	51
4.2. Bentang Alam Prioritas dan Tema Intervensi	51
4.2.1. Bentang Alam Prioritas	51
4.2.2. Tema Intervensi Prioritas	52
4.3. Program Prioritas untuk Konservasi Jenis Terancam Punah	56
4.4. Sasaran dan Hasil yang Diharapkan	57
Bab 5 PENDEKATAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM	61
5.1. Pendekatan Strategis	63
5.2. Mendukung dan Mengaitkan dengan Prioritas Konservasi Nasional dan Internasional	65
5.3. Memberantas Kejahatan terhadap Hidupan Liar	66
5.4. Memperkuat Keikutsertaan dan Kontribusi Sektor Swasta dalam Konservasi	66
5.5. Membangun Sinergi dengan Upaya Konservasi yang Lebih Luas	67
5.6. Keberlanjutan Program dan Proyek Konservasi	68
5.7. Mengaitkan dengan Prioritas Pemerintah Nasional dan Lokal	70
5.8. Membangun Kapasitas LSM dan Komunitas Konservasi Lainnya	71

Bab 6 KRITERIA DAN PENDEKATAN PEMBERIAN HIBAH	73
6.1. Proses Pemberian Hibah	75
6.1.1. Tata Kelola Penerima Hibah	76
6.1.2. Penerimaan Proposal dan Proses Hibah	77
6.1.3. Besaran Hibah	78
6.1.4. Sub-Hibah (Sub-Grant)	79
6.1.5. Modifikasi Hibah yang Sedang Berjalan	79
6.1.6. Pemberian Hibah Tambahan pada Hibah yang Sedang Berjalan	80
6.1.7. Memperkuat Monitoring, Evaluasi, dan Membangun Kapasitas	80
6.2. Kriteria dan Prioritas Pemberian Hibah	81
6.3. Safeguard Sosial dan Lingkungan	82
Bab 7 MANAJEMEN PROGRAM DAN PENGATURAN KELEMBAGAAN	85
7.1. Struktur Manajemen Program	87
7.2. Personel	87
7.3. Fasilitator Wilayah	89
7.4. Rencana Kerja dan Jadwal	91
7.5. Monitoring dan Evaluasi	91
7.6. Dokumentasi Pelaporan dan Pencapaian Lain	93
7.6.1. Laporan oleh Mitra	93
7.6.2. Laporan oleh Administrator	93
7.6.3. Pencapaian Lainnya	94
7.7. Strategi Komunikasi dan Outreach yang dijalankan oleh Program TFCA-Sumatera	94
Lampiran 1. RENCANA KERJA DAN JADWAL	98

Ringkasan Eksekutif



Pendahuluan



Sebagai salah satu hot spot keanekaragam hayati dunia dan satu dari 34 tempat di planet bumi dengan tingkat keanekaragaman hayati dan endemisme yang tinggi, kawasan sumatra terus menerus menghadapi kehilangan tutupan hutan dan penurunan populasi spesies kharismatik yang semakin tidak bisa diperkirakan. Untuk menjawab tantangan ini, sejak tahun 2010 Program TFCA-Sumatera telah bekerja sama dengan organisasi lokal yang menjadi mitra hibah TFCA-Sumatera.

Dengan menetapkan target konservasi setidaknya 1 juta ha lahan hutan pada akhir periode Rencana Strategis pertama (2010-2015), TFCA-Sumatera telah mendukung 22 proyek dari 4 siklus hibah dengan total komitmen pendanaan mencapai Rp. 109,38 milyar yang berjalan di 12 dari 13 bentang alam prioritas. Lebih jauh lagi, TFCA-Sumatera berhasil memenuhi tujuan awal dengan capaian yang tercatat di bidang pengembangan kebijakan dan kelembagaan, restorasi dan tata kelola bentang alam, konservasi spesies, pelibatan para pemangku kepentingan, dan kegiatan lain yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya capaian, lima tahun pertama implementasi program telah memberikan TFCA-Sumatera pembelajaran yang berharga, sehingga tantangan dan kesempatan pada tahun-tahun mendatang dapat diidentifikasi.

Pada bulan September 2014, Pemerintah Amerika Serikat (USG) dan Pemerintah Indonesia (GOI) sepakat untuk memperbesar program TFCA-Sumatera dengan tambahan pendanaan baru di atas dana yang telah ada saat ini. Dana tambahan tersebut didedikasikan untuk upaya pelestarian spesies kunci Sumatera yang terancam punah, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), dengan manfaat perlindungan terhadap pelestarian spesies lainnya, seperti Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). Amandemen perjanjian untuk memperluas mandat TCA-Sumatera bertepatan dengan berakhirnya periode Rencana Strategis 2010-2015, sehingga diperlukan adanya suatu dokumen baru. Dokumen tersebut disusun dengan mencakup seluruh perubahan dan pembelajaran yang terjadi selama periode lima tahun, masa rencana strategis pertama dijalankan. Oleh karena itu, rencana strategis ini mencakup seluruh rencana aksi yang akan didanai baik oleh dana TFCA-Sumatera yang telah ada maupun dana tambahan untuk konservasi Harimau dan Badak Sumatera dengan manfaat bagi konservasi spesies lain, sebagaimana yang tercantum dalam amandemen perjanjian TFCA. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan panduan bagi *Oversight Committee* dan Administrator dalam mengelola pemberian hibah dan sebagai pedoman bagi organisasi lokal untuk merancang kegiatan konservasi.

Pembelajaran dan Capaian dari Rencana Strategis 2010-2015

Dokumen Rencana Strategis TFCA-Sumatera 2010-2015 beserta dokumen kebijakan dan prosedur hibah, merupakan panduan bagi Administrator dan *Oversight Committee* untuk menyalurkan hibah kepada lembaga yang memenuhi syarat untuk menjalankan aksi konservasi di Sumatera. Rencana Strategis 2010-2015 memiliki tiga objektif kunci dan juga target konservasi.

Pada bulan Juni 2010, OC menyetujui untuk mendanai lima proposal hibah yang merupakan lima mitra pertama TFCA-Sumatera. Hibah yang diberikan antara lain berupa dukungan bagi perlindungan dan pengelolaan 835,000 ha lahan gambut yang tersisa di provinsi Riau dan Aceh yang sangat penting untuk dipertahankan. Dukungan terhadap kegiatan ini diberikan untuk periode tiga tahun. Dana hibah sejumlah Rp. 23,237,739,000 (US\$ 2,581,971) disetujui untuk mendukung lima mitra siklus hibah pertama dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam objektif rencana strategis TFCA-Sumatera. Sampai dengan akhir 2014, TFCA-Sumatera telah bekerja sama dengan 17 mitra hibah dari tiga siklus hibah. Berikut ini adalah evaluasi terhadap kinerja mereka sampai dengan akhir 2014:

1. Sejumlah intervensi yang dilakukan oleh mitra TFCA-Sumatera di tingkat tapak berhasil mengarah pada pencapaian **Objektif 1**, yaitu kontribusi terhadap konservasi 1,658,775 ha pada 10 dari 13 kawasan prioritas. Intervensi yang dilakukan berupa fasilitasi berbagai kegiatan pada tingkat tapak, misalnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, pengembangan dokumen Rencana Pengelolaan, penataan batas, restorasi lahan-lahan kritis, patroli kawasan hutan, dll. Capaian ini didukung pula oleh keberhasilan fasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi-konservasi terpadu dan berbasis potensi lokal, misalnya ekowisata, pertanian organik, peternakan, wanatani, hortikultura, kerajinan tangan, perikanan air tawar, pembibitan, kebun tanaman obat, dan *credit union*.
2. Pencapaian **Objektif 2** diwujudkan melalui beberapa intervensi, misalnya berdiri dan beroperasinya pusat reaksi cepat untuk mitigasi konflik gajah – manusia di dua bentang alam, yaitu Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tesso Nilo. Selain itu, di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berdiri dan beroperasi pula pusat respon dan mitigasi konflik harimau – manusia berbasis masyarakat. Untuk memperkuat dukungan terhadap pencapaian **Objektif 2**, TFCA-Sumatera mendukung pendanaan untuk pendirian dan operasional 16 tim monitoring hidupan liar (harimau dan badak).
3. Capaian pada **Objektif 3** ditandai dengan dukungan bagi pendirian 98 kelompok restorasi/rehabilitasi, dimana lebih dari 900 masyarakat lokal terlibat aktif untuk menghutankan kembali kawasan seluas 50,464 ha di 6 lansekap prioritas TFCA-Sumatera. Selain itu, 7 perusahaan swasta telah memberikan komitmen dan berperan aktif dalam kegiatan konservasi di kawasan Semenanjung Kampar dan Taman Nasional Tesso Nilo. Pendirian dan operasionalisasi 26 tim patroli kolaboratif yang beranggotakan masyarakat, Balai Taman Nasional, Balai KSDA, dan Dinas Kehutanan, telah mendukung perlindungan terhadap 237,700 ha kawasan hutan. Fasilitasi dilakukan untuk membangun 3 pembangkit listrik tenaga air (pico hydro dan mikro hydro) di 2 propinsi, serta dukungan terhadap pendirian 4 fasilitas ekowisata pun memberikan sumbangan besar terhadap ketercapaian **Objektif 3**.

Untuk memperkuat capaian kuantitatif tersebut, secara kualitatif dapat diidentifikasi beberapa dampak tak langsung seperti peningkatan kapasitas lembaga lokal dalam merancang, mengelola dan administrasi proyek. Kerjasama dengan TFCA-Sumatera membangun kepercayaan diri lembaga lokal karena telah memiliki kesempatan dalam

mengelola dana dalam jumlah besar. Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai konservasi juga terjadi pada pemangku kepentingan lokal, termasuk komunitas, pemerintah dan perusahaan lokal yang tergambarkan melalui dukungan (*buy-in*) terhadap proyek TFCA dan kegiatan konservasi pada umumnya. Pemerintah lokal merasa terbantu dengan adanya mitra TFCA-Sumatera, khususnya kegiatan yang secara spesifik menghasilkan atau memberikan dukungan pada pengembangan rencana tata ruang. TFCA juga memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas pemerintah dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dukungan dalam bentuk pelatihan ini telah membantu membangun kepercayaan diri pemerintah lokal dalam mengembangkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang mengacu kepada Undang-Undang Penataan Ruang. Beberapa proyek TFCA-Sumatera berhasil memperpendek rantai penjualan produksi masyarakat (*value chain*) dengan membawa pasar untuk lebih dekat kepada produsen. Nilai tambah bagi hasil produksi lokal yang sebagian besar dihasilkan oleh petani, dihasilkan dengan memotong rantai penjualan berupa pengepul ataupun tengkulak lokal. Capaian-capaian tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya konservasi dan keberlanjutannya.

Isu dan Permasalahan

Dari pembelajaran 5 tahun sebelumnya, teridentifikasi 4 isu kunci yang harus diatasi oleh TFCA-Sumatera beserta mitranya pada periode 5 tahun ke depan. Isu tersebut berkaitan dengan: kelembagaan dan kebijakan, konservasi dan perlindungan bentang alam, konservasi dan perlindungan spesies terancam punah, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara umum, keempat isu tersebut dijelaskan di bawah ini:

- (1) **Kelembagaan dan kebijakan.** Kebijakan dan praktik pemerintahan yang kurang tepat akan berpotensi menambah permasalahan di tingkat bentang alam. Oleh karena itu, tumpang tindih kebijakan dan kelemahan kelembagaan, termasuk kurangnya keterlibatan pemerintah lokal dan perusahaan dalam aksi konservasi adalah isu di dalam kerangka kelembagaan dan kebijakan yang harus diatasi oleh TFCA-Sumatera.
- (2) **Konservasi dan perlindungan bentang alam.** Lanskap atau bentang alam merupakan isu sentral dalam konservasi karena menjadi tempat bagi sekaligus terdampak oleh aktivitas manusia. Pulau Sumatera mengalami deforestasi besar-besaran, degradasi hutan dari aktivitas manusia berupa penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

- (3) Konservasi dan perlindungan spesies terancam punah. Menurunnya populasi spesies terancam punah seringkali memiliki korelasi positif terhadap hilangnya habitat dan perdagangan ilegal (termasuk perburuan). Oleh karena itu, isu spesies sangat erat kaitannya dengan isu degradasi bentang alam. Perdagangan ilegal dan kejahatan terhadap hidupan liar juga diindikasikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penurunan populasi.
- (4) Pengembangan masyarakat lokal. Keberhasilan konservasi di Sumatera sangat bergantung kepada keterlibatan masyarakat lokal. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali dituding sebagai faktor yang mendorong degradasi hutan dan perburuan liar.

Keempat isu di atas terkait dengan 2 permasalahan utama konservasi hutan di Pulau Sumatera, termasuk i) kehilangan tutupan hutan dan keanekaragaman hayati dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ii) penurunan angka populasi spesies kunci Sumatera yang terancam punah.

Laju deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Sumatera telah terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sumatera telah kehilangan 12 juta ha tutupan hutan, setara dengan penurunan sebesar 48% hanya dalam waktu 22 tahun (1985- 2007), dikarenakan konversi hutan, pembalakan liar dan kebakaran. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Sumatera berkontribusi sebesar 22,8% terhadap deforestasi Indonesia secara nasional. Sedangkan pada angka penurunan populasi, mamalia besar Sumatera seperti gajah, badak, harimau dan orangutan adalah spesies yang paling merasakan dampak hilangnya habitat akibat aktivitas manusia. Keempat spesies tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dan membutuhkan habitat yang luas dan utuh. Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan spesies tersebut, misalnya konflik manusia-satwa mengindikasikan hutan yang seharusnya menjadi habitat utama, berada dalam kondisi yang tidak sehat. Membatasi atau menurunkan laju konversi habitat secara substansial akan menjadi kunci untuk mengubah kecenderungan ini. Kehilangan habitat, perdagangan ilegal yang terkait dengan perburuan menjadi ancaman bagi kelangsungan populasi spesies terancam punah secara global, tidak hanya mamalia besar tertentu yang semakin menjadi langka, tetapi juga spesies lainnya.

Visi, Misi dan Tujuan

Berdasarkan *Forest Conservation Agreement*, TFCA-Sumatera diarahkan untuk menghasilkan dampak yang nyata dan signifikan bagi konservasi hutan di Pulau Sumatera, sehingga visi Rencana Strategis TFCA-Sumatera 2015-2020 adalah:

“KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN TROPIS DEMI Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera”

Secara langsung diterjemahkan dari *Forest Conservation Agreement*, misi TFCA-Sumatera adalah untuk:

“Fasilitasi kegiatan konservasi, perlindungan, restorasi dan pemanfaatan hutan tropis di Sumatra secara berkelanjutan”

Demi mewujudkan misi tersebut, dan mengatasi empat permasalahan utama yang diidentifikasi menjadi isu kunci (*key issues*) pada upaya konservasi di Sumatera, TFCA-Sumatera akan bekerja melalui empat objektif berikut ini:

- (1). Penguatan kelembagaan dan kebijakan pada seluruh tingkat administrasi dan pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya pelibatan pihak swasta dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan satwa terancam punah, juga demi menjamin keberlanjutan sumber daya hutan;
- (2). Penguatan upaya intervensi pada pengelolaan di tingkat bentang alam demi mempertahankan, melindungi dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, mengurangi deforestasi dan degradasi serta melakukan restorasi secara ekologis terhadap hutan yang telah terdegradasi;
- (3). Memastikan keberlangsungan dan ketersediaan populasi yang dapat bertahan untuk jangka panjang demi kelestarian satwa kunci (*key species*) yang terancam punah dan merupakan spesies bendera (*flagship species*) bagi Sumatera, antara lain Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*);

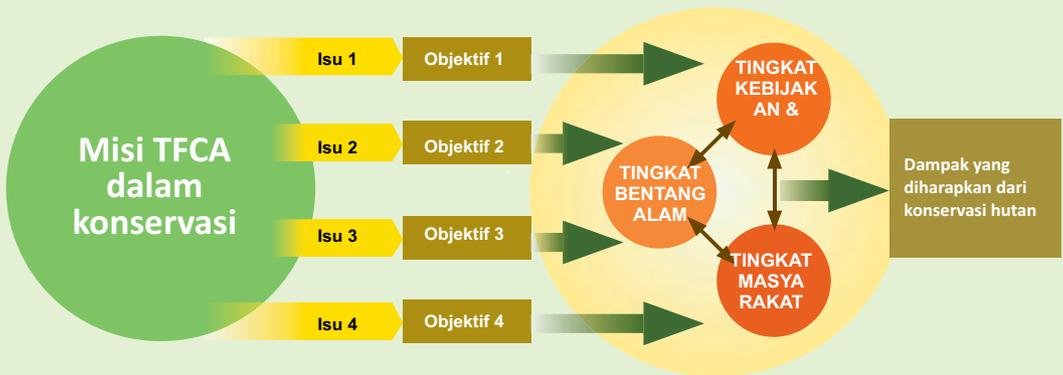
Penguatan masyarakat dan komunitas lokal, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan, serta merancang insentif bagi keterlibatan masyarakat dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan hutan.

TFCA-Sumatera menerjemahkan keempat objektif tersebut ke dalam aksi intervensi yang sesuai bagi setiap level intervensi di bawah ini:

- i) Level kelembagaan dan kebijakan;
- ii) Level bentang alam (termasuk hutan, habitat dan populasi); dan
- iii) Level masyarakat

Hubungan antara misi, isu, objektif, level intervensi dan dampak yang diharapkan tergambar dalam diagram halaman berikut:

TINGKAT INTERVENSI



Kerangka Logis

Kerangka logis (*logframe*) dalam bentuk tabel di bawah ini dikembangkan untuk mengelaborasi hubungan timbal balik di atas ke dalam aktivitas dan hasil (*outcome*).

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOMES)	AKTIVITAS
Komponen 1: PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KONSERVASI			
Pengelolaan dan perlindungan 2 juta ha hutan secara efektif (termasuk kawasan-kawasan lindung)	Memperkuat kelembagaan dan kebijakan di seluruh level: sektor publik dan swasta	Penguatan dan pengembangan kebijakan dan kelembagaan konservasi	Mengembangkan rencana tata ruang yang sejalan dengan fungsi ekologis; Mengajukan penetapan baru atau perluasan kawasan konservasi; Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi; Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan; impementasi skema Pengelolaan Berbasis Resor (Resort Based Management); Advokasi dan mengembangkan kebijakan dan aturan perlindungan hutan dan spesies; Memperkuat kebijakan dan kelembagaan pada penegakan hukum untuk memerangi kejahatan terhadap hutan dan hidupan liar
Komponen 2: MEMPERKUAT KONSERVASI HUTAN			
	Memperkuat pengelolaan khususnya intervensi di tingkat bentang alam untuk mempertahankan, melindungi dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, menekan deforestasi dan degradasi hutan dan mengembalikan fungsi ekologis hutan yang terdegradasi	Bentang alam hutan terlindungi secara efektif, menurunnya deforestasi dan degradasi hutan, dan hutan terdegradasi direstorasi	Implementasi skema restorasi ekosistem; Memperkuat kolaborasi perlindungan kawasan hutan/lindung; Penataan batas partisipatif; Implementasi Praktik Pengelolaan Terbaik (BMP) hutan industri; membangun Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
Komponen 3: MEMPERTAHANKAN DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN DAN DAYA TAHAN POPULASI SPESIES TERANCAM PUNAH DALAM JANGKA PANJANG			

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOMES)	AKTIVITAS
	<p>Memastikan populasi satwa kunci terancam punah dan <i>flagship species</i> Pulau Sumatra dapat bertahan dan keberadaan <i>viable population</i> dalam jangka panjang, termasuk Harimau Sumatra (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Badak Sumatra (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>), Gajah Sumatran (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) dan Orangutan Sumatra (<i>Pongo abelii</i>) serta memperkuat perlindungan untuk menjamin integritas, ketersediaan, keterhubungan dan keragaman habitat, baik di dalam maupun di luar kawasan lindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Habitat spesies terancam punah, termasuk harimau, badak, orangutan dan gajah; dan konektivitasnya dapat diamankan, diperbaiki dan dijaga; Populasi spesies terancam punah, termasuk harimau, badak, orangutan dan gajah stabil atau bertambah 	<p>Meningkatkan perlindungan habitat; Implementasi pengelolaan dan restorasi habitat dan ekosistem; Mengembangkan dan mempertahankan konektivitas habitat dan ekosistem (koridor satwa); Eradikasi spesies yang bersifat invasif;</p> <p>Meningkatkan viabilitas sub-populasi; Menurunkan kerawanan terhadap kelangkaan; Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi spesies; Mendirikan atau meningkatkan fasilitas konservasi ex-situ; Mendukung penelitian atau kajian mengenai isu reproduksi dan patologis;</p>
		<p>Penurunan secara signifikan angka kejahatan terhadap hidupan liar dan kasus konflik manusia-satwa</p>	<p>Mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; Mendukung mitigasi konflik manusia-satwa</p>
Komponen 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL			
	<p>Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan, dan merancang insentif atas keterlibatan masyarakat dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan</p>	<p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal untuk kemudian mampu memberikan dukungan terhadap konservasi</p>	<p>Meningkatkan frekuensi kegiatan penyadartahuan, pendidikan dan penjangkauan masyarakat; Meningkatkan ekonomi lokal; Meningkatkan praktek ekonomi hijau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan akses pasar untuk beberapa produk primer; Mengembangkan skema pendanaan berbasis lokal; Meningkatkan keterlibatan swasta pada pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal; Memenuhi kebutuhan listrik dengan teknologi energi hijau</p>

Hasil yang Diharapkan

TFCA-Sumatera menetapkan capaian target untuk aksi konservasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal yang layak mendapatkan hibah. Tabel di bawah ini memaparkan hasil yang diharapkan dalam setiap strategi intervensi.

STRATEGI INTERVENSI	HASIL YANG DIHARAPKAN
PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Minimal 2 juta ha hutan (termasuk kawasan lindung) dikelola dan terlindungi secara efektif melalui intervensi langsung di tingkat lapang, misalnya perlindungan kawasan hutan, implementasi praktik pengelolaan terbaik (<i>best management practices</i>), patroli hutan, dan pengembangan kebijakan dan kelembagaan yang secara langsung mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan;
KONSERVASI BENTANG ALAM DAN SPESIES	2. Berkontribusi terhadap penurunan setidaknya 10 % deforestasi dan degradasi hutan setidaknya 10% pada bentang alam prioritas (sesuai dengan target yang disebutkan pada paragraf 1); 3. Pengamanan setidaknya 800,000 ha habitat spesies terancam punah yang juga mengandung <i>viable population</i> bagi harimau, badak, orangutan dan gajah; 4. Secara umum, berkontribusi terhadap penurunan setidaknya sebesar 50% dari angka kehilangan populasi harimau, badak, orangutan dan gajah yang terjadi saat ini dan stabilisasi <i>viable population</i> di masing-masing wilayah geografis mereka saat ini;
PENGEMBANGAN MASYARAKAT	5. Peningkatan pendapatan [tahunan] rumah tangga sebesar 10% di beberapa kawasan yang menjadi sasaran program; dan 6. Peningkatan kapasitas ekonomi setidaknya 10 kelompok masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap konservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendekatan

Pada implementasi penyaluran hibah, TFCA-Sumatera menggunakan pendekatan dan strategi sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan strategis untuk mencapai tujuan-tujuan kunci dengan melakukan kegiatan konservasi pada tiga level intervensi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
2. Mendukung dan mengaitkan dengan Prioritas Konservasi Nasional dan Internasional, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya TFCA-Sumatera akan meneruskan dukungan terhadap prioritas konservasi nasional.

3. Memerangi kejahatan terhadap hidupan liar, termasuk yang berkesesuaian dengan dan memungkinkan untuk mendukung implementasi Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Konservasi Hidupan Liar dan Memerangi Perdagangan Satwa berikut rencana aksinya.
4. Memperkuat kerjasama dan keterlibatan pihak swasta.
5. Membangun sinergi dengan upaya konservasi yang lebih luas, termasuk kegiatan yang didukung oleh donor lain demi mencapai dampak konservasi yang lebih signifikan.
6. Memastikan keberlanjutan program dan proyek konservasi sehingga aktivitas, fungsi dan manfaatnya akan terus dirasakan bahkan setelah selesainya proyek.
7. Menghubungkan dengan prioritas pemerintah nasional dan lokal, termasuk melalui dukungan terhadap pengembangan dan implementasi rencana tata ruang yang ramah lingkungan dan mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah.
8. Membangun kapasitas Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dan komunitas lain yang bergerak di bidang konservasi, dimana pengembangan kapasitas menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan bagi mitra.

Strategi Penyaluran Hibah

Demi menjawab tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang, TFCA-Sumatera akan melakukan perbaikan terhadap strategi penyaluran hibah. Selain itu, TFCA-Sumatera juga akan mengadopsi pengaman di bidang sosial dan lingkungan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada pemberian hibah.

1. **Memperbaiki proses pemberian hibah**
 - a. Memperbaiki tata kelola mitra
 - b. Memperbaiki proses penerimaan proposal dan penyaluran hibah
 - Melanjutkan penerimaan proposal melalui *request for proposal/concept paper*
 - Penerimaan proposal terarah, dari mitra yang sesuai dengan desain kebutuhan program
 - Penerimaan proposal terarah berdasarkan isu/kegiatan

- c. Memperluas jadwal penerimaan proposal sehingga termasuk *off-cycle* atau penerimaan proposal di luar jadwal siklus hibah
- d. Menyediakan dana hibah dengan besaran yang berbeda-beda: hibah skala besar, menengah dan kecil
- e. Membuka peluang bagi *sub-granting* (sub-hibah)
- f. Membuka peluang modifikasi bagi mitra hibah yang telah berjalan
- g. Membuka peluang penambahan hibah kepada mitra hibah yang telah berjalan
- h. Memperkuat monitoring, evaluasi dan pembangunan kapasitas

2. Menerapkan Pengaman Sosial dan Lingkungan

Program TFCA-Sumatera mendukung upaya konservasi, pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, mendukung hak asasi manusia, pengarusutamaan gender dan kesetaraan sosial, serta implementasi tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik. Berdasarkan kondisi tersebut, TFCA-Sumatera mengembangkan dan mengadopsi mekanisme pengaman sosial dan lingkungan bagi implementasi program. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul di bidang sosial dan lingkungan dari implementasi program TFCA-Sumatera. Pengaman juga menjadi penting untuk meningkatkan keuntungan baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan bagi pemangku kepentingan lokal dan para penerima manfaat, maupun keberlanjutan aksi konservasi di tingkat masyarakat. TFCA-Sumatera akan menyediakan panduan mengenai safeguard di dokumen terpisah, dengan menampilkan detail panduan dan indikator

Strategi Komunikasi dan Outreach

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari tata kelola dan manajemen TFCA-Sumatera, strategi komunikasi dan outreach harus dikembangkan dengan tujuan utama untuk menunjukkan arti penting konservasi di Sumatera kepada khalayak yang lebih luas, misalnya dengan meningkatkan visibilitas program TFCA-Sumatera, memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan sehingga dapat membantu membangun dukungan bagi program. Pada gilirannya, hal ini akan membantu mitra dan Administrator untuk:

- (1) Meningkatkan visibilitas dan memberikan informasi kepada khalayak tentang Program TFCA-Sumatera;
- (2) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan meminta dukungan dari pihak terkait;
- (3) Menyusun dokumentasi kemudian berbagi pembelajaran dari implementasi program;
- (4) Menyusun rekomendasi kebijakan dan arahan bagi pemerintah lokal dan nasional, atau pihak swasta sebagai mana mestinya.

Bab 1
PENDAHULUAN



1.1.Latar Belakang

Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia telah menandatangani perjanjian pengalihan utang untuk pelestarian alam (*debt-for-nature swap agreement*) pada 30 Juni 2009 dengan kesepakatan bahwa Amerika Serikat akan mengurangi tagihan yang harus dibayar Indonesia sebesar 30 juta dolar dalam kurun waktu delapan tahun. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia akan mengerahkan dana ini untuk mendukung perlindungan dan pemulihan hutan tropis di Sumatra. Dana ini akan dikelola di bawah pengawasan negara (Indonesia), alih-alih dibayarkan pada Amerika Serikat. Perjanjian ini terwujud berkat kontribusi dari Amerika Serikat sebesar 20 juta dolar, di bawah Undang-undang Konservasi Hutan Tropis (*Tropical Forest Conservation Act*) tahun 1998 dan donasi gabungan dari Conservation International dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sebesar 2 juta dolar sebagai swap partner. Kerjasama yang unik antara pihak pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat ini merupakan yang pertama kalinya, dari dua kesepakatan TFCA yang saat ini tengah berjalan di Indonesia.

Landasan kerja untuk implementasi program TFCA-Sumatera mulai berjalan pada tahun 2010. *Oversight Committee*, dengan dukungan dari Administrator, mengembangkan rencana strategis, kebijakan dan prosedur, serta kebijakan investasi. Administrator telah mengadakan beberapa lokakarya bersifat

konsultatif di Sumatera, serta memfasilitasi pertemuan dengan calon mitra potensial untuk penulisan proposal dan penyusunan desain proyek. Tercatat bahwa TFCA-Sumatera telah mencairkan dana berjumlah sekitar 84 milyar rupiah, atau sekitar 9,3 juta dolar untuk 53 LSM di bawah 22 konsorsium atau proyek berjalan. Program ini telah membantu meningkatkan kapasitas calon penerima program untuk mengimplementasikan program secara efektif. TFCA-Sumatera bekerja dalam hal mempromosikan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif untuk mengimplementasikan perlindungan dan konservasi hutan tropis Sumatera dan keanekaragaman hayatinya, dan berpusat pada tindakan intervensi pada tiga tingkat: 1) kebijakan dan kelembagaan, 2) bentang alam dan spesies, dan 3) partisipasi, peningkatan kesejahteraan dan insentif sosio-ekonomi untuk masyarakat. Tingkatan intervensi ini sejalan dengan tujuan utama pada Rencana Strategis TFCA-Sumatera tahun 2010-2015, yang berakhir pada tahun 2015.

Seiring dengan proses negosiasi untuk perluasan program TFCA-Sumatera, pada tanggal 29 September 2014 pihak-pihak yang terdiri dari Pemerintah Indonesia (GOI), Pemerintah Amerika Serikat (USG), KEHATI dan Conservation International (CI) sepakat untuk melakukan amandemen pada perjanjian TFCA berikut: *Debt Swap Agreement*, *Forest Conservation Agreement* dan *Swap Fee Agreement*. Dengan ditandatanganinya amandemen tersebut, program TFCA-Sumatera akan mengelola tambahan dana yang berjumlah sekitar 12,68 juta dolar di atas dana yang telah ada saat ini. Utamanya, dana tambahan ini ditujukan untuk konservasi spesies kharismatik Sumatra yang terancam punah yaitu badak dan harimau, serta berkontribusi terhadap pelestarian orangutan dan gajah, berikut habitatnya. Ketentuan baru dari pemerintah Indonesia ini dijadwalkan akan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2021.

Amandemen perjanjian yang mengembangkan mandat TFCA-Sumatera bertepatan dengan usainya Rencana Strategis 2010-2015. Oleh karena itu, diperlukan dokumen Rencana Strategis baru yang mencakup seluruh perubahan, termasuk evaluasi dari periode yang telah berjalan. Seluruh perencanaan, termasuk keuangan akan membahas hibah TFCA-Sumatera yang sedang berjalan dan memasukkan dana tambahan untuk spesies. Rencana Strategis ini menjadi penting untuk menerjemahkan mandat yang tercantum dalam amandemen perjanjian TFCA, sebagai arahan bagi *Oversight Committee* dan Administrator dalam mengembangkan konservasi di Pulau Sumatra.

1.2. Arti Penting Hutan Sumatra bagi Konservasi

1.2.1. Penurunan Tutupan Hutan dan Keanekaragaman Hayati yang Di Luar Dugaan

Sumatra merupakan hot spot keanekaragaman hayati global dan menjadi 1 dari 34 lokasi yang memiliki tingkat endemisitas tinggi. Namun saat ini Sumatra berada dalam ancaman kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga menjadi kawasan konservasi prioritas lempeng Sunda. Perusakan lahan hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan degradasi hutan di Sumatra telah berlangsung dalam tahap mengkhawatirkan. Diantara tahun 1985 dan 2007, Sumatra telah kehilangan 12 juta hektar area tutupan hutan, atau setara dengan 48% dari total luas area hutan, diakibatkan oleh pengalihan area hutan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Sumatra telah menyumbang 22,8% dari total kerusakan hutan dalam skala nasional di Indonesia (1,17 juta hektar/tahun). Meskipun dibutuhkan minimal 30% dari total area tutupan hutan (menurut Undang-Undang Kehutanan no. 41 tahun 1999) untuk menyokong kehidupan masyarakat sekitar dan melindungi keanekaragaman hayati yang penting, area tutupan hutan yang tersisa di Sumatra sekarang hanya tersisa seluas 29% dari total area tutupan hutan. Selain itu, kebanyakan kawasan hutan primer yang ada terletak di dataran tinggi, yang juga merupakan area lindung dengan tingkat kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup rendah jika dibandingkan area hutan yang terletak di dataran rendah. Sebagai perbandingan, sebuah penelitian dari Margono et al (2014) menunjukkan angka hilangnya 2,8 juta hektar tutupan hutan primer (tuh maupun terdegradasi) selama 2001-2012 atau sekitar 238.000 hektar tiap tahunnya.

Perubahan drastis pada area tutupan hutan di Sumatra bisa dilihat pada peta di Gambar 1. Seluas 25 juta hektar hutan alami terdapat di Sumatra pada tahun 1985, menyebar seluas 58% di sepanjang pulau. Pada tahun 2008/9, 23 tahun setelahnya, setengah dari hutan-hutan ini (12,5 juta hektar) telah hilang. Area tutupan hutan yang tersisa di Sumatra pada tahun 2008/9 terhitung hanya 29% nya saja (12,8 juta hektar).

Usaha perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia terutama di Sumatra, telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Pemerintah Indonesia telah menghabiskan dana dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk mengelola kawasan



Gambar 1. Kehilangan Tutupan Hutan selama periode 1985-2009 (WWF, 2010)

KESENJANGAN EKOLOGIS KETERWAKILAN KAWASAN KONSERVASI DI SUMATRA



Gambar 2. Tutupan hutan tersisa, dimana kawasan Ekosistem Penting (hijau tua) akan tetap memainkan peranan penting dalam konservasi saat terhubung dengan ekosistem penyangga dan konektivitas (hijau muda) (Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010: Analisis Kesenjangan Ekologis)

lindung, dan juga memakai dana tambahan yang didapat lewat dukungan internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan LSM dalam maupun luar negeri. Tercatat bahwa pemerintah Indonesia telah menentukan 134 area dilindungi di Sumatra, dengan total area keseluruhan lebih dari 5,7 juta hektar, dimana lebih dari 60% (3.882.218,48 hektar) merupakan kawasan 11 taman nasional. Gambar 2 menggambarkan letak kawasan-kawasan lindung yang terkait dengan ekosistem penting. Jelas terlihat pada gambar bahwa ekosistem penting yang berada bukan dalam sistem perlindungan kawasan berada dalam kawasan lindung.

Analisis kesenjangan terkini mengenai tingkat keterwakilan ekologis dalam kawasan lindung memperlihatkan bahwa banyak ekosistem penting terletak di luar batas kawasan lindung. Selain itu, hampir seluruh ekosistem penting di dataran rendah juga terletak di luar kawasan kawasan lindung. **Gambar 2** menunjukkan tutupan hutan di Sumatra tahun 2010 yang diambil dari analisis kesenjangan yang disebut sebelumnya (data diambil dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2010). Oleh karenanya, upaya penyelamatan hutan di Sumatra, baik di dalam maupun diluar kawasan lindung sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dngan memperluas kawasan lindung yang telah ada atau membangun kawasan lindung baru, demikian pula dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan demi meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekologis.

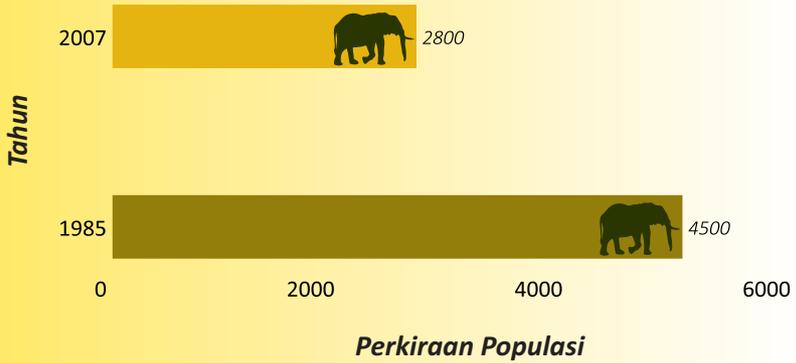
1.2.2. Penurunan Populasi Spesies Karismatik Sumatra

Mamalia berukuran besar di Sumatra, seperti gajah, badak, harimau, dan orangutan, adalah binatang yang paling terpengaruh dengan hilang/rusaknya habitat akibat tindakan manusia, dan ini dikarenakan mamalia-mamalia ini sangat bergantung pada area hutan dan membutuhkan habitat berukuran besar dan utuh. Hilang/rusaknya habitat semacam ini mengakibatkan meningkatnya jumlah dan intensitas konflik antar manusia dan hewan dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Upaya menghambat atau mengurangi konversi habitat secara substansial akan menjadi kunci untuk memecahkan masalah ini. Hilang atau rusaknya habitat, perburuan hewan secara ilegal dan perdagangan ilegal yang terkait telah menjadi masalah penting yang berhubungan dengan kemampuan bertahan hidup bagi spesies yang terancam punah, dan bukan hanya mempengaruhi hewan langka berukuran besar dan langka seperti Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) dan Gajah Sumatra

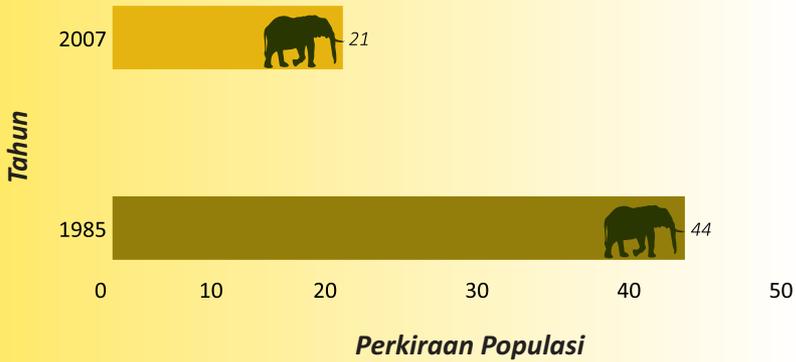
(*Elephas Maximus Sumatrensis*), tapi juga binatang-binatang seperti kukang (*Manis Javanica*), ular piton (*Python spp.*) dan rangkong (*Bucerotidae*). Banyak kasus di seluruh dunia memperlihatkan konflik antar manusia dan hewan yang pelik yang membutuhkan analisis lebih jauh untuk memahami permasalahan dan mendukung upaya-upaya konservasi spesies terancam punah dan langka. Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, telah ada korelasi yang jelas antara penggundulan hutan dan penurunan populasi hewan liar, dan korelasi ini diperkuat oleh meningkatnya konflik antara manusia dan hewan liar dikarenakan para hewan liar ini terusir dari habitat mereka di hutan, dan menjadi sasaran mudah untuk diburu ataupun dibunuh. Akibatnya, beberapa populasi spesies tertentu menjadi punah, dan ini terjadi karena tindakan pengisolasian dan terbatasnya keragaman genetik dari spesies tertentu yang menghambat tindak reproduksi dan mempertahankan kestabilan populasi.

Terkait dengan apa yang menimpa gajah sumatra, pada pertengahan tahun 1980, ketika masih terdapat 50% dari total hutan alami di Sumatra, populasi gajah bertahan di 44 area populasi yang berlainan, yang terdapat seluruh delapan provinsi di Sumatra (Hedges et al. 2005). Pada tahun 1985, hasil survei sekilas menyebutkan bahwa terdapat populasi gajah liar dalam 44 lokasi di delapan provinsi di Sumatra dengan jumlah diantara 2800 dan 4800 ekor gajah (Blouch dan Haryanto, 1984). Populasi gajah terbanyak di Sumatra pernah tercatat terletak di provinsi Riau. Namun, jumlah populasi gajah di provinsi tersebut mungkin sudah menurun drastis hingga 84% dari total populasi yang pernah tercatat sebelumnya. Telah terjadi penurunan populasi gajah secara besar-besaran –dari estimasi jumlah sekitar 1067-1167 ekor di tahun 1984 hingga sesedikit 210 ekor pada masa kini (WWF, 2012). Jika penurunan ini terus berlanjut dan hutan terbesar tempat populasi gajah seperti Tesso Nilo tidak dilindungi, populasi gajah liar di Riau akan segera punah. Estimasi jumlah populasi gajah di Sumatra berkisar diantara 2400-2800 ekor, namun jumlah ini mungkin terlalu bersifat optimis mengingat jumlah ini telah dikutip dalam berbagai tulisan sejenis selama bertahun-tahun, kendati fakta bahwa sebagian besar dari habitat gajah telah rusak selama masa pengutipan bertahun-tahun tersebut. Di tahun 2012, gajah sumatra telah berganti status dari “terancam punah” menjadi “sangat terancam punah” (*critically endangered*) mengingat setengah dari populasinya telah hilang dalam satu generasi –penurunan yang terjadi akibat rusaknya habitat dan hasil dari konflik antar manusia dan gajah liar. Sumatra telah mengalami penggundulan hutan dalam skala terbesar di persebaran gajah seluruh Asia, yang mengakibatkan kepunahan lokal para gajah di banyak tempat. Gambar 3 dibawah menunjukkan perubahan drastis dalam populasi dan persebaran gajah di Sumatra, dari tahun 1985 hingga tahun 2007.

Penurunan Populasi Gajah



Distribusi Populasi Gajah

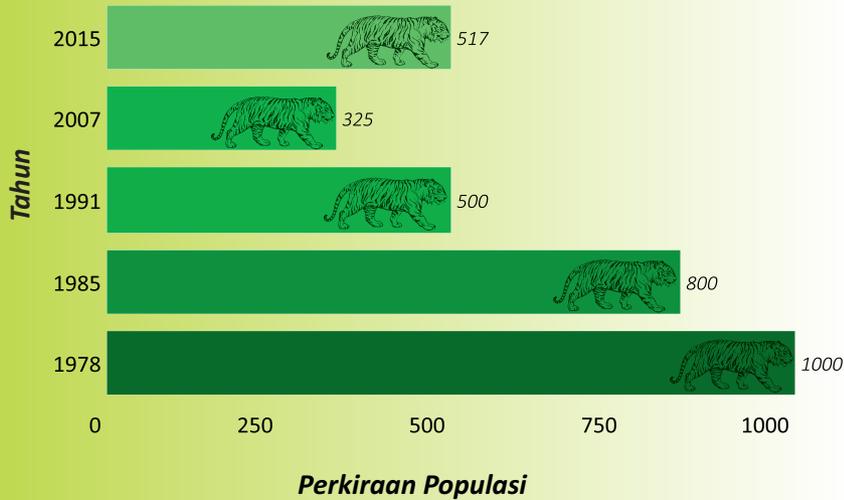


Gambar 3. Penurunan populasi dan Sub-Populasi Gajah Sumatra

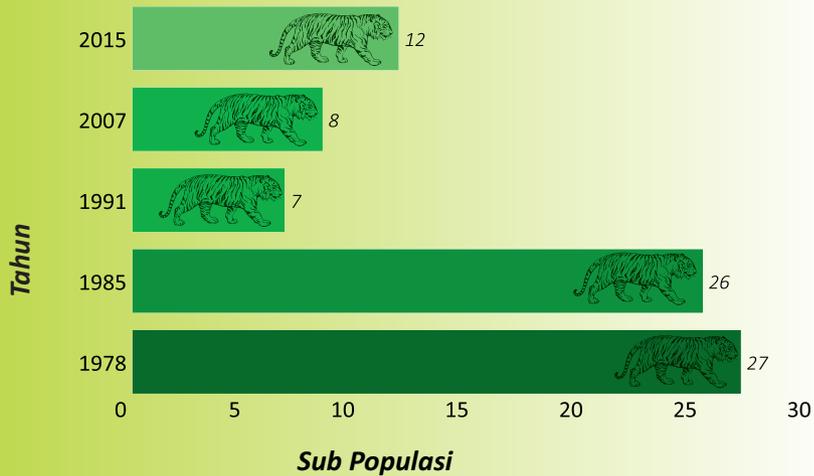
Sebagai subspecies harimau terakhir yang masih bertahan, Harimau Sumatra memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan subspecies lainnya, namun walau peningkatan upaya konservasi harimau telah ada –termasuk penegakan hukum dan tindakan pencegahan perburuan liar –pasar untuk produk dan organ dari harimau tetap ada di daerah Sumatra dan seluruh bagian Asia. Harimau Sumatra dalam tempo singkat telah kehilangan habitat dan mangsanya, sementara perburuan liar tetap tidak menunjukkan akan berhenti. Mirip dengan apa yang menimpa gajah di Riau, populasi harimau Sumatra di provinsi ini telah menurun sebanyak 70% di 25 tahun terakhir, dari jumlah 640 ekor hingga hanya tersisa 192 ekor di masa kini. Sekarang, harimau-harimau terakhir di Indonesia –berjumlah dibawah 400 ekor –tengah berusaha bertahan hidup di beberapa lokasi hutan di pulau Sumatra. Menurut survey yang diadakan TRAFFIC, sebuah organisasi yang mengawasi perdagangan hewan liar secara global, para pemburu untuk tujuan berdagang ini bertanggung jawab atas lebih dari 78% dari estimasi jumlah kematian harimau Sumatra – setidaknya 40 ekor mati setiap tahunnya. Pengrusakan habitat memaksa harimau-harimau ini untuk mencari makan di area pemukiman manusia, dimana disana mereka akan berkonflik. Konflik antar manusia dan harimau adalah masalah serius di Sumatra. Banyak orang terbunuh atau terluka, hewan ternak dimangsa oleh harimau, sehingga dapat memicu aksi penyerangan dari warga pemukiman yang dapat mengakibatkan pembantaian terhadap harimau. Grafik populasi Harimau Sumatra selama 30 tahun terakhir dapat dilihat di gambar 4.

Mengenai permasalahan Badak Sumatra, jumlah populasinya berada di tingkat yang sangat rendah. *Sumatran Rhino Crisis Summit* membuka pertemuannya dengan memaparkan berita mencengangkan, tentang jumlah badak Sumatra yang sebelumnya diperkirakan berada di angka 130-190, pada kenyataannya terhitung lebih sedikit dari 100 ekor. Setengah dari jumlah populasi badak Sumatra telah berkurang dalam kurun waktu satu dekade terakhir, walaupun penurunan ini terlihat telah mulai melambat dan jumlahnya terlihat mulai stabil di area penting. Fakta ini pun disikapi dengan membuat beberapa rencana darurat penyelamatan badak. Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*) sangat dekat dengan ancaman kepunahan di Indonesia (Nardelli 2014). Tiga pertemuan *ad hoc* untuk membahas rencana penyelamatan badak Sumatra telah dilakukan pada tahun 1984, 1993, dan 2013. Tujuan yang direncanakan pada tiga pertemuan ini tidak pernah tercapai. Meskipun upaya besar yang dilakukan oleh partisipan dan beserta kelompok rekanan lainnya, total populasi *D. Sumatrensis* di dunia mengalami penurunan selama kurun waktu

Penurunan Populasi Harimau

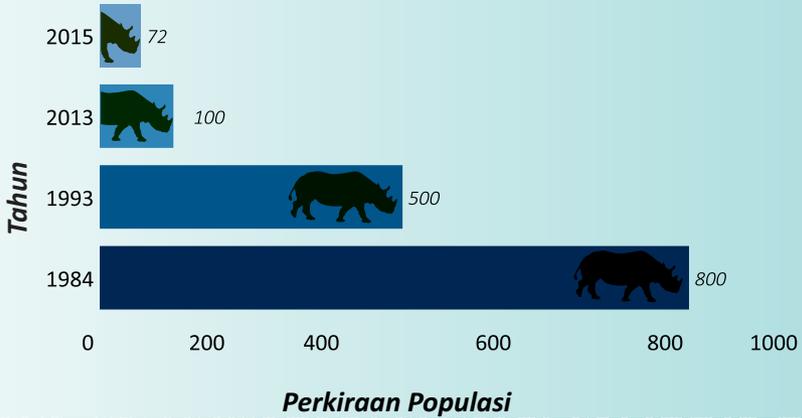


Distribusi populasi harimau

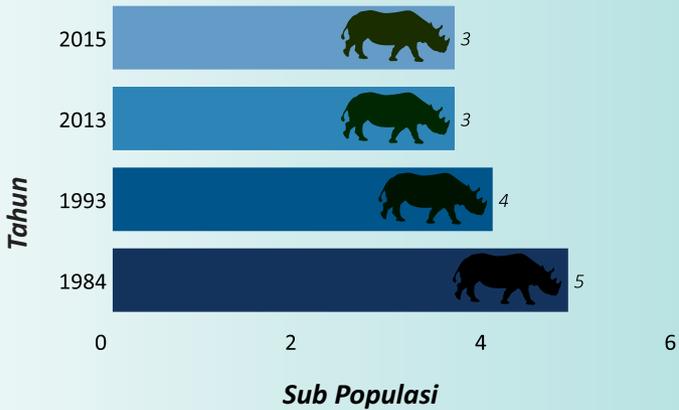


Gambar 4. Grafik populasi Harimau Sumatra dan sejarah distribusi (jumlah subpopulasi) antara tahun 1984 – 2015 (Kemenhut, 2007; & PHVA, 2015)

Penurunan Populasi Badak

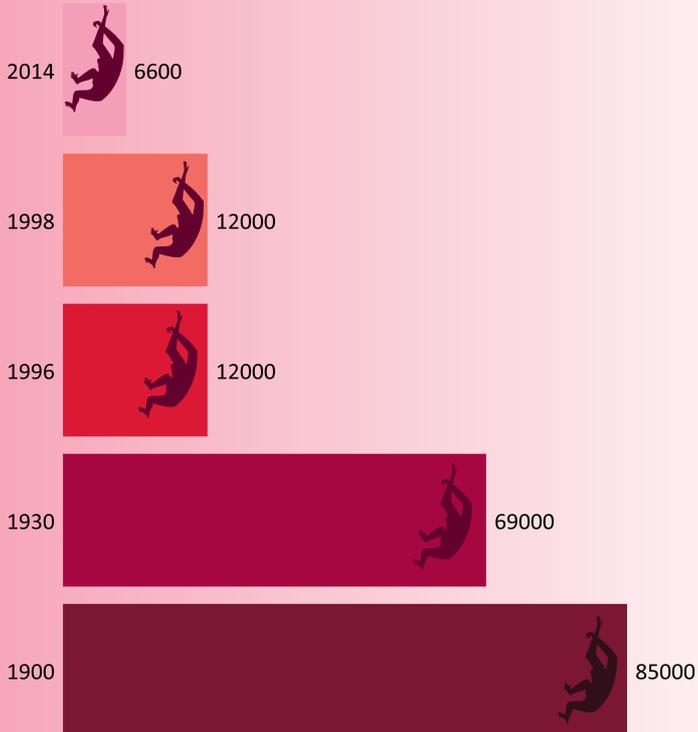


Distribusi Populasi Badak



Gambar 5. Tren dan sejarah distribusi populasi (jumlah sub-populasi) Badak Sumatra periode 1984 – 2015 (Nardelli, 2014 & PHVA, 2015)

Penurunan Populasi Orangutan



Gambar 6. Penurunan jumlah Orangutan di Sumatra sejak 1900

30 tahun terakhir dari total jumlah populasi sebelumnya yakni 800 ekor, hingga lebih sedikit dari 100 ekor pada masa sekarang. Perkembangan populasi dan perubahan distribusi badak Sumatra dalam jangka waktu 30 tahun dapat dilihat di Gambar 5.

Mengenai orangutan Sumatra, perkiraan terkini mengenai jumlah *Pongo abelii* berada pada jumlah 7300 ekor, dan tinggal di banyak area hutan yang total luasnya mencakup 20 juta hektar. Namun sekarang, para orangutan hanya tersebar di hutan-hutan yang total luasnya tak mencapai 9 juta hektar area, yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut (WWF, 2008). Data yang bisa dipercaya mengenai jumlah orangutan di Sumatra menyebutkan

ada 6600 ekor orangutan yang hidup di alam liar (Wich et al, 2011). Gambar 6 menjelaskan tentang penurunan jumlah orangutan yang tersisa setelah melewati kurun waktu 1 abad dari tahun 1900. Populasi saat ini terdistribusi di 13 area populasi yang berada pada 21 blok hutan. Hanya 7 dari populasi ini yang berprospek memiliki daya tahan hidup jangka panjang, dengan estimasi lebih dari 250 ekor atau lebih, dan hanya 3 dari seluruh area populasi ini yang ditinggali oleh 1000 orangutan. Tiga kantong populasi ini ditemukan di area ekosistem Leuser – salah satu dari area hutan di bagian utara dari pulau, yang juga tengah berada dibawah tekanan yang berasal dari manusia.

1.3. Mandat Tambahan untuk Konservasi Spesies Terancam Punah

Salah satu dari enam tujuan (*six authorized purposes*) *Forest Conservation Agreement* adalah “Restorasi, perlindungan, atau pemanfaatan beragam spesies hewan dan tumbuhan secara berkelanjutan”, termasuk didalamnya pemulihan populasi, perlindungan habitat, restorasi habitat, dan penegakan hukum terhadap aksi kriminal terhadap kehidupan satwa liar dan perambahan kawasan. Di akhir September 2014, pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, *Conservation International*, dan KEHATI menyetujui bahwa dana tambahan sebesar 12 juta dolar yang tercatat pada alokasi dana akan dipergunakan untuk keperluan konservasi spesies kunci Sumatra yang terancam punah. Sebagaimana diwajibkan pada perjanjian FCA, dana tersebut ditujukan untuk konservasi satwa harimau dan badak Sumatra. Namun, dana ini juga dapat dialokasikan untuk spesies kunci Sumatra lain, seperti orangutan, gajah, dan spesies khas Sumatra lainnya yang terancam punah.

Sebagian dari dana TFCA-Sumatera ada selama ini tersedia pula untuk mendukung konservasi spesies terancam punah, terutama untuk spesies kunci dan karismatik seperti hewan mamalia berukuran besar. Empat mamalia besar seperti badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*), harimau (*Panthera tigris sumatrae*), gajah (*Elephas maximus sumatraensis*) dan orangutan (*Pongo abelii*) adalah spesies-spesies yang paling terancam akibat kerusakan habitat dan perburuan ilegal di Sumatra. Oleh karena itu, spesies tersebut menjadi prioritas utama untuk tujuan konservasi. Tindakan-tindakan konservasi spesies dalam konteks pengembangan ini terdiri dari aktifitas yang terintegrasi, dengan perlindungan satwa liar

bersandingan dengan perlindungan bentang alam, peningkatan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat untuk penghidupan yang layak sebagai *sine qua non* untuk meraih tujuan tersebut. Oleh karenanya, strategi hibah bagi dana tambahan ini akan dirancang sejalan dengan dana yang tersedia. Selain intervensi untuk populasi dan habitat satwa liar, konservasi satwa liar di Sumatra harus memperhitungkan permasalahan konflik manusia dan satwa. Oleh karena itu, TFCA-Sumatra diharapkan dapat membantu pemecahan masalah konflik antara manusia dan satwa dengan intervensi terintegrasi dan membantu penegakkan hukum pada tingkat tertentu. Selain dari intervensi langsung pada semua jenis tingkat populasi dan habitat, survey landasan kerja dan monitoring juga diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai pola populasi dan habitat. TFCA Sumatra juga dapat mendukung penelitian mengenai keragaman genetik, dan kapasitas reproduktif dan patologi pada spesies satwa liar yang terancam punah dalam rangka mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dari penurunan jumlah populasi.



Bab 2
**PEMBELAJARAN DARI IMPLEMENTASI
PROGRAM 2010-2015**



2.1. Tahap Awal TFCA-Sumatera



Tahun 2010 adalah tahun awal dimana TFCA-Sumatera menetapkan landasan kerja untuk memperkenalkan implementasi program. *Oversight Committee*, dengan dukungan dari Administrator, mengembangkan rencana strategis 2010-2015, kebijakan dan prosedur program, prosedur operasional dan rekomendasi untuk kebijakan mengenai investasi. Administrator mengatur beberapa lokakarya bersifat konsultatif di area penting di Sumatera, dan memfasilitasi penulisan proposal dan pertemuan dengan calon potensial penerima desain proyek. Rencana strategis tahun 2010-2015 dari TFCA-Sumatera, bersama dengan kebijakan dan prosedur yang terkait, memberikan arahan bagi Administrator dan *Oversight Committee* untuk menyalurkan hibah bagi mitra melaksanakan konservasi hutan di Sumatera. Tiga tujuan utama dari rencana strategis tahun 2010-2015 adalah:

- (i) Mengembangkan efektivitas pengelolaan pada setidaknya 1 juta hektar hutan di Sumatera di tahun 2015 secara berkelanjutan dengan memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan komunitas lokal;

- (ii) Menguatkan partisipasi komunitas dalam konservasi spesies kunci Sumatera, termasuk gajah, orangutan, harimau, dan badak, dan juga penetapan dan/atau pemeliharaan ketersambungan habitat kritis dan untuk menjamin keberlangsungan populasi yang viabel dalam jangka panjang; dan
- (iii) Memberdayakan komunitas lokal untuk mendukung dan mengurangi laju deforestasi hutan dan degradasi ekosistem setidaknya sebesar 26% di bentang alam prioritas.

Oversight Committee menyetujui pembukaan penerimaan proposal hibah TFCA-Sumatera pada Bulan Juni 2010, kemudian meloloskan 3 proposal pada akhir tahun 2010 dan dua proposal tambahan pada awal tahun 2011. Hibah ini bertujuan untuk mengembangkan perlindungan dan pengelolaan sekitar 835.000 hektar lahan penting hutan gambut yang tersisa di Riau dan Aceh selama 3 tahun. Nilai hibah yang disetujui adalah sekitar Rp. 23,237,739,000 (US\$ 2,581,971) menandai siklus hibah pertama TFCA-Sumatera. Pada awal tahun 2015, TFCA-Sumatera telah menyetujui penerima hibah untuk siklus kelima.

2.2. Penyaluran Hibah TFCA-Sumatera Saat ini dan Capaian Lainnya

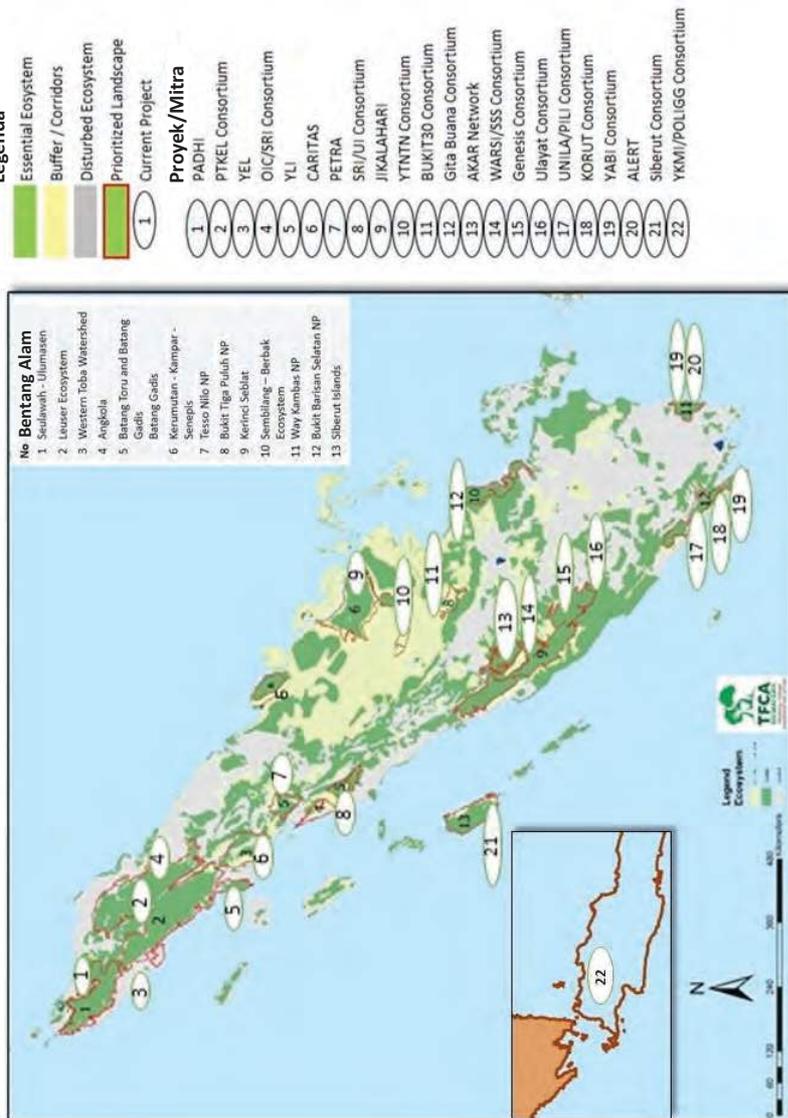
2.2.1 Pemberian Hibah

Sejak 2010, TFCA-Sumatera telah meluncurkan lima siklus hibah dengan memberikan 22 hibah. Sekitar enam atau lebih hibah sedang disiapkan untuk segera disalurkan. Saat ini hibah telah didistribusikan secara hampir merata pada 13 bentang alam penting di Sumatera sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. Hingga Desember 2014, pemerintah Indonesia telah mentransfer dana sejumlah 22.331.034,02 dolar AS sebagai bagian dari kewajibannya yang sejalan dengan perjanjian pengalihan utang (*debt-swap agreement*). Bunga yang didapat dari rekening *Debt Service Account* (DSA) berjumlah US\$ 38.226,20 dolar AS, sehingga total dana yang didapat hingga bulan Desember 2014 adalah 22.369.260,22 dolar AS. Untuk keperluan manajemen, penarikan dana perwalian (*Trust Fund*) secara kumulatif mulai dari pendirian hingga tahun 2014 berjumlah 1.594.368,55 dolar AS.

Biaya pengiriman uang berjumlah 690 dolar AS, biaya pengelolaan *Trust Fund* adalah 75.643,98 dolar AS dan pengeluaran lain-lain adalah 13.709,36 dolar AS. Tabel 1 menunjukkan posisi dana *Trust Fund* hingga Desember 2014.

Tabel 1. Posisi dana TFCA di *Debt Service Account* (DSA) per Desember 2014 (dalam US\$)

PENERIMAAN	
Transfer dari GOI	22,331,034,02
Bunga	38,226.20
Total diterima	22,369,260.22
PENGELUARAN	
Transfer ke Rekening Hibah (BNI '46)	11,134.566,15
Transfer ke Rekening Manajemen (Bank Permata)	1,594.368,55
Biaya tahunan	75,643,98
Biaya pengiriman (<i>Remittance</i>)	690,00
Lain-lain	13,709,36
Total Pengeluaran	12,818,977.04
Saldo di DSA	9,550,283.18



Gambar 7. Peta 22 Proyek TFCA-Sumatera yang sedang berjalan di 13 bentang alam prioritas

Hingga Desember 2014, program TFCA-Sumatera telah membuat komitmen untuk mendanai 22 proyek dari 4 kali siklus hibah senilai total sebanyak Rp. 109,38 miliar yang digunakan pada 12 dari 13 bentang alam selama kurun waktu 2011-2017. *Oversight Committee* setuju untuk memberikan hibah pada 6 calon penerima hibah dari siklus hibah ke-lima pada bulan Desember 2014, dan meminta Administrator untuk menilai 6 calon lainnya sebagai bahan pertimbangan. Didalam kebijakan penyaluran hibah yang baru, TFCA-Sumatera juga membuka kesempatan untuk hibah dengan jumlah dana yang lebih kecil dan pendanaan di luar siklus demi mengakomodasi kebutuhan pendanaan untuk konservasi yang penting dan mendesak. Tabel 2 menunjukkan ringkasan dari perkembangan hibah TFCA-Sumatera, pengeluaran dan investasi hingga Desember 2014.

2.2.2 Capaian

Evaluasi terhadap 17 penerima hibah dari tiga siklus pertama, menunjukkan beberapa pencapaian yang didapat hingga akhir 2014:

1. Pencapaian atas tujuan 1: meningkatkan efektivitas pengelolaan di sedikitnya 1 juta hektar hutan di Sumatra tahun 2015 secara berkelanjutan melalui perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan komunitas lokal;
 - a. Intervensi TFCA-Sumatera telah memberikan dampak konservasi pada 1.658.775 hektar kawasan sebanyak 10 dari 13 bentang alam prioritas dengan memfasilitasi pengelolaan hutan berbasis komunitas, pengelolaan rencana pengembangan, pembuatan tata batas, restorasi atau rehabilitasi habitat yang terdegradasi, patroli hutan, dan implementasi Pengelolaan Berbasis Resor (RBM) pada kawasan lindung, dimana resor adalah unit pengelolaan terkecil dari kawasan lindung, dan pada batasannya ditentukan dari aktivitas pengelolaan dan dimana seharusnya sumber daya (uang dan manusia) dikerahkan.
 - b. Diantara 2011-2013, TFCA-Sumatera telah berhasil memfasilitasi pembentukan, implementasi, dan penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, termasuk 26 Hutan Desa, 8 Hutan Adat, dan 3 Hutan Komunitas dengan luasan total 64.044 hektar pada ekosistem Kampar, Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Tabel 2. Ringkasan Hibah TFCA-Sumatera (dalam dolar AS*)

Data Hibah	2002-2010	Tahun				Total
		2011	2012	2013	2014	
Jumlah proposal diterima	129	39	21	29	31	249
Jumlah proposal disetujui	3	9	0	10	6	28
Total dana hibah yang disetujui	\$1,634,637	\$ 947,334	\$3,175,969	\$ 3,015,574	\$3,375,702**	\$12,149,216
Total dana hibah yang disalurkan	\$ -	\$ 903,203	\$1,694,867	\$ 3,036,490	\$2,249,557	\$7,884,117
Total dana dampingan (<i>grantee cost-share</i>)	\$331,978	\$-	\$333,384	\$ 795,097	\$ 189,219	\$1,649,678
Maksimalisasi pendanaan lain, misalnya <i>co-financing (leverage)</i>	\$34,661	\$-	\$403,346	\$48,41	\$-	\$438,055
Total pembiayaan bersama (<i>matching fund</i>) dari % hibah yang disetujui	22%	n/a	19.7%	26%	0%	18.8%
Jumlah biaya manajemen	\$277,538	\$309,000	\$306,894	\$441,772.79	\$467,768	\$1,802,973
Pendapatan Investasi	\$10,840	\$52,275	\$45,287	\$80,006.12	\$144,444	\$332,552.12
Saldo hibah di akhir tahun ***	\$6,041,200	\$8,555,772	\$10,801,319.6	\$8,838,818.52	\$8,667,745	n/a

- *) Untuk nilai perbandingan tetap, nilai tukar yang digunakan adalah US\$ 1 = Rp. 9,000. Rata-rata nilai tukar sebenarnya: 2012=Rp. 9,682; 2013= Rp. 10,307; 2014= Rp. 11,828
- **) Anggaran untuk mitra siklus hibah 5 masih dalam proses negosiasi, tidak termasuk dalam total dana hibah yang telah disetujui.
- ***) Saldo Hibah hanya di DSA. Untuk menghitung saldo dana di rekening FCA ,Total Dana Hibah yang Disetujui dikurangi Total Dana Hibah yang Disalurkan

- c. TFCA-Sumatera telah mengembangkan 11 kegiatan konservasi ekonomi terpadu berbasis lokal, contohnya seperti HHNK, ekowisata, pertanian organik, peternakan, agroforestry, hortikultura, kerajinan tangan, pemancingan air tawar, pembibitan, dan koperasi. Aktivitas-aktivitas ini secara langsung terhubung dengan lebih dari 700 rumah tangga di 159 grup lokal, dan 13 koperasi.
2. Pencapaian atas tujuan 2: menguatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi satwa liar kunci Sumatra, termasuk gajah, orangutan, harimau, dan badak, termasuk mendirikan dan/atau menghubungkan habitat kritis untuk memastikan kemampuan bertahan hidup populasi viabel dalam jangka panjang:
 - a. Pembangunan dan pengoperasian 2 pusat respon dan pencegahan konflik antar manusia dan gajah, dilengkapi dengan 7 gajah dan 12 pawang di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tesso Nilo.
 - b. Sebanyak 7 perusahaan swasta telah berkomitmen dan berpartisipasi dalam konservasi, termasuk pendanaan RAPP untuk restorasi hutan bakau di Kampar, PT Muslim Mas mendanai kebutuhan operasional untuk Gondai Flying Squad (sentra respon konflik mengenai gajah) di Taman Nasional Tesso Nilo.- lihat dokumen asli. point 2 b belum diterjemahkan
 - c. Pembentukan dan pengoperasian dari 16 tim pemantau satwa liar (badak dan harimau). Baru-baru ini, tim patroli telah mengidentifikasi setidaknya 30 ekor harimau baru di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, 1 ekor harimau baru di Kerinci Seblat, dan 1 bayi badak di taman nasional Way Kambas. Data ini berkontribusi untuk pemetaan populasi liar dari spesies yang terancam punah.
3. Pencapaian atas tujuan 3: memberdayakan komunitas lokal perihal mengurangi penurunan angka penggundulan hutan dan degradasi ekosistem setidaknya 26% dari seluruh bentang alam penting
 - a. Pembentukan atas 98 tim restorasi/rehabilitasi yang mengikutsertakan 900 warga lokal untuk merestorasi sekitar 50.464 hektar lahan didalam 6 bentang alam penting.
 - b. Sebanyak 7 perusahaan swasta telah berkomitmen dan berpartisipasi dalam proses konservasi, termasuk pendanaan RAPP untuk restorasi hutan bakau di daerah Kampar, PT Musi Mas mendanai kebutuhan operasional untuk *Gondai Flying Squad* (pusat respons konflik pada gajah) di taman nasional Tesso Nilo.

- c. Pembentukan dan pengoperasian dari 26 tim patroli gabungan (mengikutsertakan staf dari taman nasional, KSDA, unit kehutanan, dan komunitas lokal), melindungi 237.000 hektar area hutan.
- d. TFCA-Sumatera telah memfasilitasi pengembangan dari 3 pembangkit tenaga model Pico-hydro, dan 4 fasilitas ekowisata lokal.

Secara keseluruhan, aktifitas TFCA-Sumatera selama masa tiga tahun mengimplementasikan program hibah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan capaian dan indikator sampai Desember 2014

	VOLUME
Proyek/Hibah	
Jumlah program yang didanai	22
Jumlah bentang alam prioritas yang telah diintervensi	12 dari 13
Total komitmen hibah (Rp)	109.342.948.359
Tutupan kawasan yang telah diintervensi (ha)	1.647.891
Jumlah kawasan konservasi/ekosistem penting dimana program berjalan	15
Pengembangan kebijakan & Kelembagaan	
Jumlah kebijakan yang mendukung konservasi (peraturan lokal, Peraturan Gubernur, Keputusan Bupati) dihasilkan	9
Jumlah Kelompok PHBM yang didirikan dan dikuatkan	38
Tata kelola dan restorasi bentang alam	
Tutupan kawasan PHBM yang didirikan dan dikuatkan (ha)	67.430
Kawasan kritis/kawasan hutan terdegradasi yang direstorasi (ha)	50.464
Total tutupan kawasan patroli (ha)	237.000
Panjang penataan batas kawasan konservasi (km)	66
Konservasi spesies	
Jumlah Pusat Mitigasi Konflik Satwa -Manusia didirikan	3
Jumlah tim monitoring Spesies Terancam Punah (Badak, Harimau, Gajah) dikembangkan	10

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	
Jumlah kelompok masyarakat terlibat (ekonomi, restorasi , patroli, CRU)	125
Jumlah LSM terlibat (lembaga anggota mitra konsorsium)	53
Jumlah kelembagaan pemerintah terlibat (di tingkat provinsi, kabupaten, unit pelaksana terpadu)	30
Jumlah perusahaan/sektor swasta terlibat	2
Ekonomi Hijau & Pembangunan Berkelanjutan	
Jumlah kelembagaan ekonomi yang dikembangkan (koperasi, pembiayaan mikro)	28
Total pembangkit listrik micro/pico-hydro beroperasi	3
Jumlah pusat belajar dikembangkan	3

Selain pencapaian kuantitatif diatas, dampak kualitatif bersifat tak langsung juga terlihat hasilnya. Sebagai contoh, dengan dukungan berkelanjutan dari Administrator, kapasitas dari desain, pengelolaan dan administrasi proyek dari LSM terkait juga berkembang karenanya. LSM terkait juga lebih mampu dan berkomitmen dalam mengelola hibah yang terhitung cukup besar. Perkembangan serupa juga terjadi pada area yang mempengaruhi pemangku kepentingan lokal, termasuk didalamnya komunitas lokal, pemerintah lokal, dan sektor swasta dalam hal pembelian, perhubungan, dan bahkan dalam bekerja sama untuk proyek TFCA dan mengembangkan kesadaran untuk konservasi. Pemerintah lokal, terutama pada tingkat kabupaten, sangat terbantu oleh keberadaan hibah dari TFCA, khususnya karena membantu pengembangan perencanaan tata ruang. TFCA pun mendukung kapasitas pemerintah untuk menjalankan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah membuat pemerintah lokal lebih mampu dalam mengembangkan rencana tata ruang yang sejalan dengan hukum yang terkait.

Meningkatkan nilai produk lokal juga telah tercapai dalam beberapa proyek TFCA dengan mendekati pihak pasar pada pihak produsen. Dalam hal ini nilai tambah untuk produk lokal meningkat sejalan makin diperpendeknya rantai nilai (*value chain*) yang menghilangkan peran perantara yang tidak diperlukan. Pencapaian-pencapaian ini diharapkan dapat berkontribusi penuh pada upaya konservasi dan kelangsungan konservasi itu sendiri.

2.3. Tantangan dan Peluang

2.3.1. Tantangan

2.3.1.1. Tantangan Konservasi

Tantangan yang mungkin dapat menghambat upaya konservasi di lapangan terdapat pada tiga tingkatan, termasuk didalamnya kebijakan dan kelembagaan, perlindungan spesies dan bentang alam, dan hubungan dengan komunitas, pemerintah lokal, dan sektor swasta.

Kebijakan dan Kelembagaan terkait Konservasi. Reformasi dan tata kelola pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi terdesentralisasi telah merubah poros kekuasaan pemerintah, dari berada pada pemerintah pusat, kini poros kebijakan berada pada pemerintah kabupaten, membuat pihak Bupati menjadi kuat secara politis. Kebijakan kehutanan di Indonesia telah menjadi terdesentralisasi. Pengalaman serupa yang terjadi di negara lain mengenai desentralisasi sistem pengelolaan kehutanan seringkali menghasilkan penggunaan sumber daya hutan yang lebih adil dan bertahan lama, karena para pembuat keputusan bertempat dekat dengan area dimana kebijakan yang mereka buat diimplementasikan. Namun, tindakan desentralisasi kebijakan ini telah mendukung klaim-klaim atas sumber daya hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghasilkan konflik atas sumber daya hutan di tingkat kabupaten lokal. Terdapat pula kasus atas pemberian izin yang bertumpukkan atas satu area tertentu. Upaya pengelolaan sumber daya hutan untuk kebutuhan berkelanjutan pun menjadi tugas yang tidak mudah. Salah satu kemungkinan yang dapat dijalankan untuk mengurangi kemungkinan akan masalah-masalah tersebut terjadi lagi kedepannya adalah mendistribusikan keuntungan dari hutan secara merata pada seluruh penanam saham. Peningkatan keuntungan dari penggunaan hutan pada tingkat lokal, dapat membuka kesempatan untuk penggunaan hutan jangka panjang. Pemerintah lokal dapat memulai upaya meningkatkan pendapatan lokal dari sektor hutan lewat Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), termasuk didalamnya perdagangan karbon lewat program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang mendukung inisiatif perorangan, komunitas, proyek dan negara yang berpartisipasi pada pengurangan gas rumah kaca dari hutan. Pada skala nasional, terdapat beberapa undang-undang mengatur kebijakan konservasi di Indonesia. Pada beberapa tingkatan tertentu, undang-undang ini menyediakan upaya konservasi yang cukup dan arahan untuk mengembangkan implementasi kebijakan konservasi. Namun, hambatan masih timbul dalam tahap implementasi hukum pada tingkat tapak. Contohnya, implementasi

perencanaan tata ruang, berdasarkan pada Undang-Undang tata ruang, seringkali tidak konsisten dengan implementasi yang diberlakukan lewat undang-undang kehutanan atau konservasi. Banyak rencana tata ruang dari tingkat provinsi dan kabupaten seringkali berakhir pada konversi hutan dan kawasan lindung. Ditambah lagi, undang-undang konservasi yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak berwajib untuk pengelolaan konservasi tidak menguatkan kebijakan konservasi lokal yang direncanakan sebelumnya. Hal ini pun dipersulit dengan fakta bahwa pemerintah tingkat kabupaten juga diberikan kuasa untuk mengeluarkan ijin konsesi penambangan dan kehutanan, sehingga dibanyak kasus konsesi perkebunan, kehutanan, acapkali tumpang tindih dengan kawasan lindung.

Perlindungan Bentang alam dan Spesies. Pada tingkat bentang alam, fragmentasi dan hilangnya kawasan hutan mungkin adalah tantangan konservasi terbesar yang dihadapi di Sumatera. Berkurangnya populasi spesies bisa dikaitkan dengan hal ini. Konversi hutan, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, adalah faktor terbesar yang menyebabkan penggundulan hutan dan menjadi ancaman terbesar bagi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Sumatera, berhubung perkembangannya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Karena sejarahnya yang panjang ini, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan infrastruktur yang mendukungnya sudah lebih maju daripada di daerah-daerah lain di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, industri kelapa sawit sudah sangat berkembang dan sudah tumbuh dua kali lipat dari 4,2 juta ha di tahun 2000 menjadi 8 juta ha di tahun 2010. Distribusi geografis perkebunan kelapa sawit di Indonesia menunjukkan bahwa 66% perkebunan kelapa sawit berlokasi di Sumatera, 30% di Kalimantan, 3% di Sulawesi, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk Jawa dan Papua. Sumatera dan Kalimantan adalah dua pusat perkebunan kelapa sawit, dan kebanyakan berlokasi di 10 dari 32 provinsi di Indonesia.

Tantangan lain bagi konservasi di level bentang alam adalah kurangnya data. Data, terutama data populasi spesies, penggundulan hutan, dan kondisi habitat kebanyakan tidak lengkap atau janggal. Ini bisa menghalangi pencapaian target dalam proses konservasi.

Hubungan dengan Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pihak Swasta. Dalam implementasi program TFCA, ada beberapa tantangan dalam tingkat masyarakat yang sebaiknya diperhatikan oleh penerima dana. Pelibatan masyarakat dalam hal konservasi

biasanya dibangun melalui pengembangan masyarakat atau peningkatan taraf hidup dengan mengembangkan ekonomi dan bisnis lokal. Ada banyak usulan untuk pengembangan masyarakat dan komersialisasi produk lokal. Meskipun begitu, kebanyakan mitra LSM tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis sosial dan kewirausahaan. Di samping masalah-masalah teknis, banyak yang memerlukan pengembangan kemampuan dalam bisnis dan kewirausahaan lokal yang padat karya. Lebih jauh lagi, partisipasi yang rendah dalam konservasi oleh pemerintah daerah juga bisa banyak ditemui di lokasi-lokasi TFCA. Tantangan-tantangan ini bisa ditangani oleh pihak program TFCA-Sumatera dengan cara membentuk fasilitator-fasilitator wilayah di tiga daerah TFCA. TFCA-Sumatera akan berusaha untuk menjembatani kesulitan komunikasi yang banyak terjadi di antara pihak swasta dan kelembagaan non-pemerintah. Melalui fasilitator wilayah ini, TFCA bisa menjalin hubungan dengan pihak swasta dalam hal konservasi hutan dalam kolaborasi dengan kelembagaan non-pemerintah lokal.

2.3.1.2. Tantangan Manajemen

Ada beberapa tantangan manajemen yang ditemui oleh TFCA-Sumatera yang perlu ditindaklanjuti dalam implementasi program. Tantangan-tantangan tersebut adalah:

1. Jumlah personil Administrator yang tidak memadai untuk melakukan monitoring, evaluasi dan mengembangkan kapasitas mitra yang berkaitan baik dengan program atau pun administrasi.
2. Situasi politik lokal di beberapa lokasi proyek, yang menghalangi pencapaian target konservasi.
3. Sulitnya akses ke lokasi proyek dari ibukota provinsi. Kebanyakan lokasi proyek terdapat di daerah-daerah terpencil dengan rata-rata waktu tempuh sekitar 4-15 jam menggunakan transportasi darat.
4. Dalam beberapa kasus, kurangnya kapasitas LSM mitra dalam hal pelaksanaan administrasi, pengaturan keuangan, dan implementasi program, menyebabkan rendahnya serapan dana dan kualitas kinerja dan capaian di beberapa proyek.

2.3.2. Peluang

TFCA sebaiknya mempertimbangkan beberapa peluang yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi program konservasi di Sumatera. Peluang-peluang ini adalah:

1. Ada proyek konservasi lain yang didukung oleh donor yang dapat diajak kerjasama oleh TFCA untuk mendapatkan hasil yang saling melengkapi.
2. Sektor swasta atau perusahaan sudah mulai lebih aktif dan responsif dan terbuka untuk bekerja dengan LSM untuk mendukung konservasi.
3. Pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk mendukung konservasi.
4. Kemampuan dari LSM (setidaknya 58 lembaga di 22 konsorsium) sudah lebih baik dan memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan menghasilkan desain proyek dan implementasi proyek yang lebih efektif.
5. Lebih banyaknya dukungan dari masyarakat lokal akan membantu memastikan bahwa program konservasi bisa lebih mudah diterapkan di lokasi.

Isu-isu konservasi atau lingkungan telah menjadi salah satu prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah

Bab 3
VISI, MISI DAN TUJUAN



3.1 Visi

Visi dari program TFCA-Sumatera sesuai dengan arahan Forest Conservation Agreement, di mana program TFCA-Sumatera harus melakukan konservasi yang berdampak signifikan bagi hutan di Sumatera. Atas dasar pertimbangan ini, Rencana Strategis TFCA-Sumatera tahun 2015-2020 memiliki visi sebagai berikut:

“KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI HUTAN TROPIS DEMI Mendukung PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DI SUMATERA”

3.2. Misi

Sejalan dengan Forest Conservation Agreement, misi dari TFCA-Sumatera adalah untuk **“Fasilitasi kegiatan konservasi, perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan hutan tropis yang berkelanjutan di Sumatera.”**

3.3. Isu-isu yang Harus Dihadapi

Berdasarkan identifikasi persoalan yang ada, pelajaran yang didapat, dan tantangan konservasi yang dihadapi oleh TFCA-Sumatera, ada empat isu utama yang harus ditangani oleh TFCA-Sumatera dan para mitranya dalam lima tahun ke depan. Isu-isu ini berhubungan dengan: kelembagaan dan kebijakan, perlindungan dan konservasi bentang alam, perlindungan dan konservasi spesies terancam punah, dan pengembangan masyarakat lokal. Secara umum, isu-isu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) **Kelembagaan dan kebijakan.** Kebijakan yang tumpang tindih serta kelemahan dalam organisasi, termasuk kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam langkah-langkah konservasi adalah beberapa hal yang perlu ditangani oleh TFCA-Sumatera. Persoalan-persoalan ini terdapat pada semua level pemerintahan, mulai dari level nasional sampai ke level paling bawah, seperti di tingkat desa. Pembuatan batas kawasan lindung, perencanaan manajemen kawasan lindung, dan penataan ruang yang ekologis dalam level lokal (kabupaten dan desa) adalah beberapa isu yang paling penting dari segi kebijakan dan kelembagaan.
- (2) **Perlindungan dan konservasi bentang alam.** Ini merupakan isu utama konservasi, karena semua masalah mempunyai implikasi pada bentang alam. Di sinilah di mana kegiatan manusia berlangsung dan di mana dampak-dampaknya terjadi. Tingkat penggundulan hutan, degradasi hutan, dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan di Sumatera sangatlah tinggi. Penyebab-penyebab penggundulan hutan antara lain adalah konversi lahan, pendudukan lahan, dan penambangan ilegal. Kebijakan dan pengaturan yang tidak sesuai juga telah menyebabkan masalah-masalah pada alam. Ini mengakibatkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati yang besar, dan lahan-lahan yang sangat tidak produktif. Beberapa kegiatan yang penting untuk dilakukan antara lain adalah merestorasi kawasan hutan yang kritis, perlindungan hutan melalui kegiatan patroli, dan peningkatan efektivitas manajemen hutan melalui implementasi teknik-teknik manajemen yang baik dan manajemen kawasan lindung berbasis resor.
- (3) **Perlindungan dan konservasi spesies terancam punah.** Menurunnya populasi sebagian besar spesies disebabkan oleh kegiatan jual-beli (termasuk perburuan illegal) dan berkurangnya habitat. Karena itu, isu-isu ini sangat berhubungan dengan masalah degradasi bentang alam. Berkurangnya habitat dan fragmentasi kawasan juga menyebabkan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama untuk mamalia berukuran besar seperti gajah, orangutan, dan harimau. Ditambah lagi, belum ada data yang akurat mengenai jumlah populasi dan distribusinya. Perdagangan illegal dan kejahatan terhadap satwa liar juga menyebabkan berkurangnya populasi. Maka, langkah yang harus diprioritaskan untuk menangani isu yang berkaitan dengan hidupan liar antara lain adalah perlindungan populasi dan habitat, pengumpulan data yang akurat, dan pemberian dukungan kepada penegak hukum untuk mengurangi kejahatan terhadap satwa liar.

- (4) Pengembangan masyarakat lokal. Kesuksesan konservasi di Sumatera sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sering dikatakan sebagai penyebab utama penggundulan hutan dan perburuan satwa liar yang illegal. Sudah ada banyak program dan proyek untuk pengembangan masyarakat lokal, penurunan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, pendidikan tentang konservasi, dan upaya pengembangan ekonomi lokal lainnya. Kesuksesan sebuah program masyarakat hanya bisa dicapai ketika bantuan yang diberikan ke masyarakat dilakukan dengan intensif dan terus-menerus untuk waktu yang cukup lama. LSM setempat sudah semakin sadar akan perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui pengembangan aktivitas bisnis di tingkat daerah. Meskipun begitu, banyak dari mereka tidak cukup mahir untuk melaksanakan tugas seperti itu. Dalam hal ini, TFCA akan melakukan pengembangan kemampuan untuk organisasi non-pemerintah dan para pemangku kepentingan.

3.4 Tujuan

Untuk mencapai misi dan mengatasi isu-isu tersebut di atas, TFCA Sumatera akan berusaha melalui beberapa objektif sebagai berikut:

- (1). Memperkuat kelembagaan dan kebijakan di setiap level administrasi dan pihak yang berkepentingan. Ini termasuk menjalin hubungan dengan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas manajemen hutan dan satwa liar dan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya kehutanan;
- (2). Memperkuat praktik intervensi manajemen di level bentang alam untuk mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan fungsi ekologi hutan, mengurangi penggundulan dan degradasi hutan, dan merestorasi ekologi hutan yang telah terdegradasi;
- (3). Memastikan keberlangsungan dan jumlah populasi dari spesies kunci dan terancam, seperti harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan orangutan Sumatera (*Pongo abelii*). Strategi ini juga meliputi penguatan perlindungan habitat untuk menjaga integritas, ketersediaan, konektivitas, dan keragaman di dalam dan di luar kawasan lindung;
- (4). Memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, dan menyiapkan insentif untuk keterlibatan dalam konservasi, perlindungan, dan manajemen hutan.

3.5. Level Intervensi

Sebagaimana yang tertulis pada bagian misi, Aksi Konservasi Hutan Tropis untuk Sumatera didirikan untuk memfasilitasi konservasi, perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan hutan tropis yang berkelanjutan, termasuk keanekaragaman hayatinya di Indonesia. Misi ini akan dicapai melalui implementasi empat strategi yang disebutkan di atas. TFCA akan menerapkan empat strategi ini melalui aksi intervensi dalam level yang sesuai. Level intervensi tersebut adalah i) level kelembagaan dan kebijakan, ii) level bentang alam (termasuk hutan, habitat, dan populasi); dan iii) level masyarakat. Penjelasan mengenai ketiga level intervensi ini adalah sebagai berikut:

1) **Tingkat kelembagaan dan kebijakan**

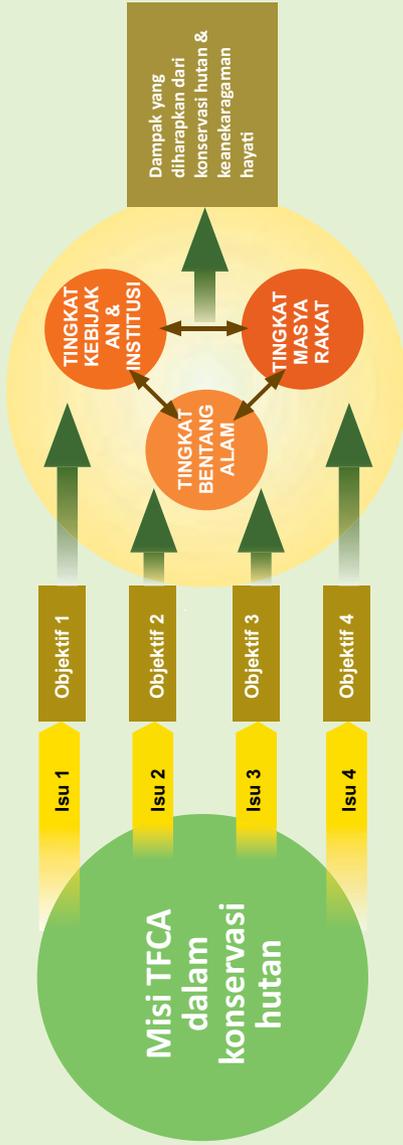
Intervensi di level kelembagaan dan kebijakan adalah komponen yang penting untuk kesuksesan sebuah aksi konservasi. Di level kelembagaan dan kebijakan, TFCA-Sumatera harus bisa membangun kondisi yang kondusif untuk konservasi. Dalam hal ini, intervensi harus dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kebijakan dalam bentuk penguatan peraturan, peningkatan kemampuan, penjalinan hubungan dengan masyarakat daerah, dan kerja sama antarpihak di tingkat lokasi, kabupaten, provinsi, dan nasional, dan di level pemerintahan, masyarakat, serta sektor swasta (termasuk organisasi pemerintah);

2) **Tingkat bentang alam**

Intervensi di level bentang alam harus menjadi inti dari segala upaya konservasi. Intervensi di level bentang alam berarti intervensi langsung di tingkat tapak untuk melindungi keanekaragaman hayati di level ekosistem, spesies, dan genetik, melindungi kawasan hutan, dan melindungi populasi satwa liar Sumatera yang terancam. Bentuk intervensi dapat dikelompokkan ke dua kategori yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada:

- a. Restorasi ekosistem yang kritis, mempertahankan hutan dan populasi, dan melindungi habitat dan spesies melalui restorasi lahan yang terdegradasi, penanaman hutan kembali, pengawasan dan patrol berkala, dan implementasi praktik manajemen yang terbaik; dan
- b. Perlindungan spesies-spesies tertentu yang penting dan terancam, seperti harimau, badak, dan spesies lainnya, termasuk perlindungan dan perbaikan habitat mereka, dan perlawanan terhadap kejahatan terhadap satwa liar.

TINGKAT INTERVENSI



Gambar 8. Hubungan antara misi, objektif, dan level intervensi terhadap dampak kegiatan konservasi oleh TFCA-Sumatera

1) Tingkat masyarakat

Aktivitas intervensi pada tingkat masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan cara mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti HHNK, pertanian organik, penyediaan jasa lingkungan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ini adalah bagian penting dari upaya-upaya konservasi di mana masyarakat lokal harus memainkan peran penting dalam konservasi. Pengalaman telah mengajarkan bahwa tanpa keterlibatan yang cukup dari masyarakat lokal, upaya-upaya konservasi tidak akan bisa berhasil.

Ketiga tingkat intervensi ini harus diterapkan dalam konteks upaya konservasi di bentang alam yang diprioritaskan. Gambar 8 mengilustrasikan hubungan antara misi, keempat strategi, ketiga tingkat intervensi, dan dampak yang diharapkan dari konservasi hutan.

Berdasarkan misi TFCA, yang adalah untuk “fasilitasi kegiatan konservasi, perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan hutan tropis di Sumatera secara berkelanjutan”, ada empat isu yang paling penting. Empat isu ini dikelompokkan dalam i) kebijakan yang tumpang tindih dan lemahnya kelembagaan, ii) degradasi dan fragmentasi alam, iii) menurunnya populasi spesies terancam, dan iv) kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat lokal. Isu-isu ini akan ditangani oleh TFCA-Sumatera melalui empat strategi, yaitu i) memperkuat kelembagaan dan kebijakan di semua tingkat administrasi dan pihak-pihak yang berkepentingan, ii) memperkuat praktek intervensi manajemen pada tingkat bentang alam, iii) memastikan keberlangsungan dan jumlah populasi dari spesies-spesies kunci dan terancam di Sumatra dalam jangka panjang dan memperkuat perlindungan habitat, dan iv) memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, dan menyiapkan insentif untuk keterlibatan mereka dalam konservasi, perlindungan, dan pengelolaan hutan. Keempat strategi ini diuraikan dalam langkah-langkah yang diterapkan melalui tiga tingkat intervensi, yang adalah i) intervensi di tingkat kebijakan dan kelembagaan, ii) intervensi di tingkat bentang alam, dan intervensi di tingkat masyarakat.

Aktivitas yang dilakukan melalui ketiga tingkat intervensi tersebut telah terbukti efektif untuk konservasi hutan di bentang alam Sumatera. Maka dari itu, dalam lima tahun ke depan (2015-2020), TFCA-Sumatera akan mengimplementasikan aktivitas intervensi dalam tiga tingkat ini.

Hubungan antara Visi, Misi, Isu, Strategi, dan Hasil yang diharapkan bisa dilihat di kerangka logis (*logframe*) yang ditampilkan di Tabel 4.

Tabel 4. Kerangka Logis (Logical Framework) Program TFCA-Sumatra

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
Komponen 1: PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KONSERVASI				
Pengelolaan dan atau perlindungan 2 juta ha hutan (termasuk kawasan lindung) secara efektif	Penguatan kelembagaan dan kebijakan di seluruh tingkatan administratif dan pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan spesies terancam punah dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan	Kelembagaan dan kebijakan konservasi berkembang dan menguat sehingga mampu menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan tropis di bentang alam prioritas di Sumatra	Memperkuat kelembagaan yang bekerja di bidang konservasi, mengembangkan tata ruang dan atau kebijakan yang berdasarkan konservasi dan selaras dengan nilai ekologis, serta membangun kapasitas kelembagaan yang bekerja di bidang konservasi dan pembangunan	Draf final Undang-undang dan peraturan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Peraturan Desa, Rencana Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
			Mengusulkan kawasan konservasi baru atau memperluas yang telah ada	Proposal final untuk membangun kawasan lindung baru atau usulan memperluas kawasan lindung yang telah ada
			Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan lindung/konservasi	Rencana pengelolaan kawasan konservasi atau kawasan lindung
				Personel Taman Nasional terlatih

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Mengatkan koordinasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan kehutanan	Membentuk kelembagaan diantara pemangku kepentingan, untuk kolaborasi pengelolaan hutan dengan melibatkan sektor swasta dan berkolaborasi dengan pemerintah lokal
			Implementasi rencana pembangunan desa partisipatif	Menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif, termasuk rencana pengelolaan hutan desa dan hutan adat
			Implementasi skema pengelolaan kawasan lindung berbasis resor (RBM)	Sistem untuk pengelolaan berbasis resor (RBM) tersusun dan diimplementasikan
			Advokasi dan mengembangkan kebijakan/peraturan/panduan bagi konservasi dan perlindungan hutan/habitat dan spesies	Dokumen/materi final untuk mendukung kebijakan konservasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten
			Mengembangkan rencana aksi konservasi spesies	Rencana aksi konservasi spesies
			Memperkuat kebijakan dan kelembagaan untuk penegakan hukum dalam memerangi kejahatan terhadap hutan dan hidupan liar	Berkembang kolaborasi atau kemitraan antara badan penegak hukum di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk perlindungan

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Berkembangnya kebijakan dan rencana mengenai PHBM di tingkat provinsi/kabupaten; Berkembang dan berjalannya rencana dan aksi bisnis untuk hutan desa dan kawasan PHBM lainnya
Komponen 2: MEMPERKUAT KONSERVASI KAWASAN HUTAN				
	Penguatan praktek dan intervensi pada pengelolaan di tingkat bentang alam untuk menjaga, melindungi dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan melakukan restorasi ekologis kawasan hutan yang terdegradasi	Kawasan hutan terlindungi secara efektif, penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan, restorasi kawasan hutan terdegradasi	Implementasi skema restorasi ekosistem	Kegiatan restorasi diinisiasi, berlangsung dan dipertahankan di kawasan hutan terdegradasi
			Memperkuat kolaborasi untuk perlindungan kawasan hutan atau kawasan lindung	Patroli dan monitoring berlangsung di kawasan lindung dan kawasan hutan
			Melakukan penataan batas partisipatif	Kawasan lindung memiliki tata batas fisik dan legal

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Implementasi praktik pengelolaan terbaik pada hutan industri	Dikembangkan dan diimplementasikan praktik pengelolaan terbaik di kawasan konsesi, misalnya HCVF.
			Mendirikan PHBM	Disahkannya hutan desa, hutan adat dan bentuk PHBM lainnya
Komponen 3: MEMPERTAHANKAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN POPULASI DAN VIABLE POPULATION SPESIES TERANCAMI PUNAH DALAM JANGKA PANJANG				
	Memastikan populasi satwa kunci terancam punah dan <i>flagship species</i> Pulau Sumatra dapat bertahan dan keberadaan viable population dalam jangka panjang, termasuk Harimau Sumatra (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Badak Sumatra (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>), Gajah Sumatran (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) dan Orangutan Sumatra (<i>Pongo abelii</i>) serta memperkuat perlindungan untuk menjamin integritas, ketersediaan, keterhubungan dan keragaman habitat, baik di dalam maupun di luar kawasan lindung	Habitat dan konektivitas spesies terancam punah termasuk harimau, badak, orangutan dan gajah, terlindungi, meningkatkan kualitasnya dan dikelola dengan baik	Meningkatkan perlindungan habitat	Unit patroli habitat dan tim anti perburuan beroperasi; patroli berjalan intensif di kawasan lindung yang menjadi habitat satwa

DAIMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Implementasi pengelolaan dan restorasi habitat dan ekosistem	Perbaikan kondisi habitat; habitat dan ekosistem direstorasi.
			Mengembangkan dan mengelola konektivitas habitat dan ekosistem (<i>wildlife corridor</i>)	Koridor satwa dan atau konektivitas habitat berdiri dan dikelola secara formal
			Melakukan eradikasi spesies invasif pada habitat satwa terancam punah	Spesies invasif berhasil dieradikasi
		Populasi satwa terancam punah, termasuk harimau, badak, orangutan dan gajah terjaga stabilitasnya atau meningkat jumlahnya	Meningkatkan viabilitas beberapa sub-populasi spesies terancam punah	Sub-populasi non-viable dipindahkan atau terhubung sehingga terbentuk <i>viable population</i>
			Menurunkan kerentanan spesies terancam punah dengan mempertahankan viabilitas sub-populasi yang sehat	Terjaga dan meningkatnya kondisi <i>viable sub-population</i> spesies terancam punah
			Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi mengenai spesies	Database populasi yang dikelola dengan baik
			Mendirikan atau meningkatkan fasilitas konservasi ex-situ (termasuk kebun binatang, fasilitas pembiakan dan penangkaran)	Fasilitas konservasi ex-situ dan fasilitas pembiakan meningkat kondisi dan pelayanannya

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Mendukung riset dan kajian mengenai reproduksi dan patologi spesies untuk mengidentifikasi penyebab penurunan angka populasi dan memberi masukan untuk meningkatkan pertumbuhan populasi	Hasil riset dan kajian digunakan sebagai dasar pengembangan dan perbaikan habitat dan populasi serta berkembangnya pilihan bentuk pengelolaan lainnya
		Kejahatan terhadap hidupan liar dan konflik manusia-satwa menurun secara signifikan hukum	Mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan liar oleh aparat dan badan penegak hukum	Angka dan <i>Number and magnitude of wildlife crimes reduced</i>
			Mendukung mitigasi konflik satwa-manusia	Angka insiden konflik satwa-manusia menurun
Komponen 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL				
Memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan, serta merancang insentif untuk keterlibatannya dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan hutan	Kesejahteraan masyarakat lokal meningkat sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan konservasi		Mendukung kegiatan penyadartahuan, pendidikan lingkungan dan <i>outreach</i>	Terbentuknya kader dan jawara konservasi berbasis masyarakat lokal berkembang, dan terlatih Jumlah orang dan kelompok yang menerima program pendidikan dan penyadartahuan; Publikasi berbagai materi yang berkaitan dengan konservasi.
			Meningkatkan perekonomian lokal melalui implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)	Kapasitas kelompok pengelola PHBM meningkat

DAMPAK KONSERVASI	OBJEKTIF	HASIL (OUTCOME)	KEGIATAN	LUARAN (OUTPUT)
			Meningkatkan praktik ekonomi hijau, termasuk wanatani, pertanian organik, HHNK, jasa lingkungan dan ekowisata	Pendapatan rumah tangga atau produksi primer masyarakat meningkat
			Memperbaiki akses pasar untuk beberapa produk lokal	Rantai pemasaran beberapa produk utama masyarakat semakin pendek, misalnya melalui menghubungkan masyarakat secara langsung dengan pasar (pabrik, eksportir)
			Mengembangkan skema pembiayaan di tingkat lokal	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal, misalnya koperasi dan sistem kredit mikro
			Meningkatkan pelibatan sektor swasta dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal	Jumlah perusahaan swasta yang terlibat dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal
			Memenuhi kebutuhan fasilitas tertentu misalnya melalui pembangunan sumber energi hijau dan pembangkit listrik	Dibangunnya sumber energi berbasis sumber daya air dan kotoran ternak

Bab 4
ARAHAN
RENCANA STRATEGIS 2015-2020



4.1. Arahan Umum



Seperti yang diilustrasikan di Gambar 8, secara umum, Rencana Strategis tahun 2015-2020 berpusat pada implementasi aktivitas dalam tiga tingkat intervensi untuk mencapai hasil konservasi hutan yang maksimal. Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang dimulai dari tingkat lokasi dan tingkat administrasi pemerintah telah memungkinkan aktivitas konservasi di tingkat bentang alam. Perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal telah menjamin kelanjutan upaya konservasi di tingkat bentang alam. Hubungan antara tingkat intervensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 8

4.2. Bentang Alam Prioritas dan Tema Intervensi

4.2.1. Bentang Alam Prioritas

Sesuai dengan *Forest Conservation Agreement*, 13 bentang alam prioritas untuk program TFCA-Sumatera telah ditentukan di seluruh pulau Sumatera. Program TFCA-Sumatera berfokus pada lingkungan yang kaya secara biologis, termasuk ekosistem-ekosistem penting di dalam dan di sekitar area terlindungi, dan juga keterhubungan antara koridor-koridor habitat dan agro-ekosistem di sekitar area prioritas yang dikelola oleh masyarakat lokal. Dalam tahap ini, TFCA telah memberikan hibah di 12 dari 13 lingkungan prioritas.

Namun ada kesenjangan intervensi di banyak lingkungan tersebut, termasuk satu lingkungan yang tidak mendapat intervensi TFCA sama sekali.

Untuk masa lima tahun berikutnya (2015-2020), TFCA-Sumatera akan memberikan perhatian khusus untuk bentang alam yang belum mendapatkan intervensi yang cukup dari TFCA-Sumatera di periode 5 tahun pertama (2010-2015). Bentang alam ini meliputi Angkola yang sejauh ini tidak mendapatkan intervensi sama sekali. Bentang alam lainnya yang masih mengalami kesenjangan intervensi, seperti Taman Nasional Sembilang di bentang alam Berbak-Sembilang, Taman Nasional Siberut, Kampar-Senepis-kerumutan, Hutan Batang Toru, kawasan Taman Nasional Batang Gadis, dan Ekosistem Leuser. Prioritas pemilihan akan dilakukan berdasarkan tingkat ancaman dan tekanan pada ekosistem hutan di tingkat bentang alam, termasuk lokasi di mana populasi spesies langka (seperti harimau, badak, gajah, dan orangutan) memerlukan intervensi secepatnya.

Selain itu, tiga bentang alam yaitu Kawasan Ekosistem Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas, dimana terdapat sejumlah besar populasi badak dan harimau juga ditetetapkan sebagai intervensi yang penting. Sesuai dengan amandemen perjanjian TFCA dimana spesies-spesies langka, terutama badak dan harimau, akan diprioritaskan untuk konservasi, tiga bentang alam ini akan menjadi penting untuk TFCA. Upaya yang mendesak di bentang alam lain dalam 13 lokasi geografis tersebut akan diprioritaskan sesuai dengan tingkat kepentingan dan aktivitas yang diusulkan dalam kerangka konservasi hutan di tingkat bentang alam dan spesies.

4.2.2. Tema Intervensi Prioritas

Ada dua ancaman utama terhadap sumber daya kehutanan dan kelanjutan jangka panjang dari keanekaragaman hayati terkait yang memerlukan intervensi konservasi:

- 1) Penghancuran hutan, yang mencakup penebangan hutan, degradasi dan fragmentasi hutan;
- 2) Kejahatan terhadap satwa liar dan pemanfaatan hasil alam yang tidak berkelanjutan.

Penyebab dasar dari ancaman-ancaman ini berhubungan dengan tiga tingkat di mana intervensi konservasi harus diarahkan. Dalam hal ini, ancaman-ancaman ini bisa disebabkan oleh lemahnya kelembagaan dan kebijakan, implementasi manajemen di tingkat tapak, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. TFCA-Sumatera harus memfasilitasi implementasi intervensi konservasi untuk menyingkirkan atau mengurangi ancaman-ancaman di ketiga tingkat, yaitu intervensi dalam tingkat kebijakan dan kelembagaan, bentang alam, dan

masyarakat. Integrasi dari ketiga tingkat intervensi ini bisa menghasilkan dampak konservasi yang cukup terasa jika diterapkan dengan benar. Namun demikian, diperlukan upaya terpadu, kerja multi-disipliner, dan pendekatan terhadap implementasi yang terintegrasi.

Kelemahan kebijakan terjadi di tingkat desa, kabupaten, propinsi, dan nasional, dan ini mempengaruhi upaya konservasi di lapangan. Dalam rangka memperkuat atau merombak kebijakan-kebijakan seperti itu, intervensi harus meliputi pembuatan rencana tata ruang, pembuatan rencana manajemen kawasan lindung, sampai pengembangan atau reformasi peraturan di tingkat lokal seperti peraturan desa, kabupaten, dan propinsi. Dalam hal kelembagaan, ada beberapa hal mengenai kelembagaan di setiap tingkat yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan konservasi, yang perlu diperkuat. Contohnya adalah peningkatan organisasi manajemen hutan oleh berbagai pihak, pengembangan organisasi bisnis di tingkat desa atau kelompok masyarakat seperti koperasi dan sistem pembiayaan mikro atau credit union, dan penguatan jaringan pasar antara petani dan industri. Intervensi konservasi tidak akan berhasil tanpa kebijakan dan kelembagaan yang baik.

Manajemen hutan di tingkat tapak, yang meliputi perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, dan restorasi, mempunyai peran yang penting dalam menjaga fungsi hutan. Sejumlah besar sumber daya TFCA akan digunakan untuk implementasi upaya konservasi di bidang ini.

Tabel 5 menunjukkan prioritas dan contoh dari aktivitas tematis berdasarkan ancaman-ancaman terhadap hutan dan keanekaragaman hayatinya, diimplementasikan dalam tiga tingkat intervensi yang sesuai. Tabel ini berisi contoh-contoh target, maka TFCA-Sumatera masih bisa mengakomodasi usulan yang menunjukkan indikator lain, selama usulan tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 5. Prioritas dan Intervensi Strategis berdasarkan Isu dan Ancaman

INTERVENSI STRATEGIS	HASIL YANG DIHARAPKAN	SASARAN DAN INDIKATOR
<p>PENGEMBANGAN KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN</p>	<p>1. Minimal hutan seluas 2 juta ha (termasuk kawasan lindung) akan dikelola secara efektif dan dilindungi melalui intervensi langsung di tingkat lingkungan seperti perlindungan hutan, implementasi praktik manajemen terbaik, dan pengembangan kebijakan dan kelembagaan yang secara langsung mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan meningkatkan efektivitas manajemen dari setidaknya 2 juta ha hutan tropis di bentang alam prioritas Sumatra. • Diterbitkannya 2 peraturan pemerintah lokal, atau 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis. • Diterbitkannya 5 kebijakan yang mendukung konservasi • Pengembangan 5 Rencana Pengelolaan kawasan lindung. • Pengembangan dan penerapan 2 sistem RBM • Penerbitan 10 peraturan menteri dan peraturan daerah untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). • Pelatihan terhadap personil di setidaknya 12 taman nasional / Balai Konservasi Sumber Daya Alam. • Adanya BMP, HCVF, BBOP, sertifikasi, pemberian kontribusi, atau penyediaan dukungan untuk kegiatan konservasi (termasuk restorasi hutan, konservasi spesies, mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar) yang dilaksanakan oleh minimal 2 konsesi swasta. • Adanya 3 kerja sama dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah secara berkelanjutan, membentuk 1 kerja sama baru • Pengajuan 1 usulan area konservasi baru atau 1 usulan untuk melanjutkan area konservasi yang sudah ada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
<p>PERLINDUNGAN DAN RESTORASI BENTANG ALAM</p>	<p>2. Minimal 10% kontribusi untuk pengurangan penebangan hutan dan degradasi hutan di bentang alam prioritas, sesuai dengan hasil yang diharapkan no. 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan 10 unit atau 1.000 ha area PHBM baru • Perbaikan 30 unit atau 50.000 ha kawasan PHBM yang sudah ada • Pemeliharaan 500 ha area restorasi hutan yang sudah ada • Restorasi 300 ha hutan yang terdegradasi • Rehabilitasi 20.000 ha lahan kritis (yang bukan hutan) • Pengamanan 800.000 ha hutan / kawasan lindung melalui patrol dan pengawasan intensif • Pengamanan 1 habitat/area penting dengan spesies yang mengganggu di area terlindungi atau menemukan 1 metode untuk menangani spesies yang mengganggu.

<p>KONSERVASI SPESIES</p>	<p>3. Mengamankan setidaknya 800.000 ha habitat spesies langka yang berisi populasi minimal harimau, badak, dan orangutan.</p> <p>4. Setidaknya 50% kontribusi dalam taraf yang ada sekarang untuk pengurangan penurunan populasi harimau, badak, orangutan dan gajah, dan populasi minimum yang stabil di wilayah geografisnya sekarang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setidaknya mempertahankan populasi spesies langka yang ada sekarang (berdasarkan baseline data 2007 menurut KemenLHK) sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • - Harimau di 5 bentang alam • - Badak di 3 bentang alam • - Gajah di 5 bentang alam • - Orangutan di 3 bentang alam • Perbaiki 1 fasilitas konservasi ex situ untuk spesies terancam, misalnya badak • Penurunan tingkat kejahatan terhadap satwa liar sebanyak 30% (berdasarkan data tahun 2014) • Pengurangan insiden konflik antara manusia dan satwa liar sebanyak 10% di 3 bentang alam (data tahun 2014) • Perbaiki 2 fasilitas mitigasi konflik manusia dan satwa liar • Pembentukan dan atau penguatan 10 tim mitigasi konflik manusia dan satwa liar.
	<p>5. Peningkatan pendapatan rumah tangga sebanyak 10% [per tahun] di beberapa area target, dan</p> <p>6. Setidaknya perbaikan 10 kelompok masyarakat dalam hal kemampuan ekonomi, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif pada konservasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 warga lokal dijadikan pahlawan konservasi • Peningkatan kemampuan 10 kelompok PHBM dalam hal kemampuan organisasi dan teknik manajemen hutan • Peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 10% (berdasarkan data tahun 2014) • Pembentukan/peningkatan kualitas 20 koperasi/pendanaan mikro • Pelibatan 30 perusahaan swasta dengan komunitas untuk menyalurkan produk-produk komunitas • Bantuan terhadap 250 lembaga ekonomi lokal dalam meningkatkan sistem produksi (wanatani, kelompok petani, kelompok kerajinan tangan, kelompok perikanan, koperasi, kerja sama bisnis) • Bantuan terhadap 25 kelompok ekonomi lokal dalam mengimplementasi skema nilai tambah • Perbaiki sistem pertanian 75 kelompok petani lokal • Implementasi skema jasa ekosistem (ekoturisme, piko/mikro hidro, jasa air komersial, dll.) pada 20 kelompok • Pembentukan/penguatan 20 kelompok produk HHNK • Produksi dan publikasi 2 jurnal ilmiah, 3 buku, dan 2 film.

4.3. Program Prioritas untuk Konservasi Jenis Terancam Punah

Satu dari enam tujuan program di dalam *Forest Conservation Agreement* adalah “restorasi, perlindungan, atau pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan”, yang meliputi pemulihan populasi, perlindungan habitat, restorasi, dan penegakan hukum. Pada akhir September 2014, USG, GOI, CI dan KEHATI menyetujui bahwa tambahan dana sebesar 12,7 juta dolar AS di luar dana yang sudah ada akan tersedia untuk konservasi spesies-spesies langka utama Sumatra yang dialokasikan khususnya kepada harimau dan badak Sumatra. Tetapi, dana ini juga akan tersedia untuk spesies-spesies langka utama yang lainnya, seperti orangutan Sumatra dan gajah Sumatra.

Dalam pengembangan ini, konservasi spesies dilakukan lewat aktivitas yang terpadu, dengan perlindungan hidupan liar sebagai tujuan utama, sementara perlindungan bentang alam, perbaikan tata kelola dan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapainya. Oleh karena itu, hibah yang digunakan untuk membangun strategi dari dana tambahan ini akan dibangun sejalan dengan strategi yang sudah ada.

Sebagian dana TFCA-Sumatera yang telah tersedia saat ini juga akan menunjang konservasi seluruh spesies langka. Empat mamalia terbesar, yakni badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), harimau (*Panthera tigris sumatrae*), gajah (*Elephas maximus sumatraensis*), orangutan (*Pongo abelii*), adalah yang paling terpengaruh oleh kehilangan habitat dan perburuan di Sumatra. Spesies-spesies ini oleh karena itu merupakan yang diprioritaskan untuk konservasi.

Di antara empat spesies ini, badak dan harimau barangkali adalah yang paling terancam punah. Populasi badak Sumatra di Sumatra dilaporkan kurang dari 100 ekor yang tersebar di tiga taman nasional: Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan, dan Taman Nasional Way Kambas, sementara populasi harimau hanya sekitar kurang dari 100 tersebar di seluruh Sumatra. Sejalan dengan fakta ini, dana tambahan sebesar 12,7 juta dolar AS ditambahkan ke dalam program TFCA-Sumatera saat ini di bawah *Forest Conservation Agreement* yang telah diamandemen, dan akan disediakan secara khusus untuk menunjang konservasi badak dan harimau Sumatra.

Selain daripada intervensi terhadap populasi margasatwa dan habitat, konservasi margasatwa di Sumatra harus memperhitungkan kejahatan hutan dan margasatwa serta konflik manusia-margasatwa. Dalam hal ini, TFCA-Sumatera hendaknya juga dapat mendukung intervensi yang terpadu yang melibatkan penegakan hukum dan resolusi konflik manusia-margasatwa. Sebagai tambahan dari intervensi langsung terhadap populasi dan habitat, penting pula untuk menentukan dasar dan mengamati survey-survey dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang populasi dan tren habitat.

4.4. Sasaran dan Hasil yang Diharapkan

TFCA-Sumatera menetapkan target konservasi dalam melakukan kegiatan konservasi melalui pemberian hibah kepada organisasi-organisasi yang memenuhi syarat berdasarkan pencapaian Rencana Strategis 2010-2015 sebagaimana ditampilkan di Tabel 6.

Tabel 6. Intervensi strategis dan target capaian

INTERVENSI STRATEGIS	HASIL YANG DIHARAPKAN	SASARAN DAN INDIKATOR
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN	1) Setidaknya 2 juta ha hutan (termasuk kawasan lindung) akan dikelola secara efektif dan/atau dilindungi melalui intervensi langsung pada tingkat bentang alam, seperti perlindungan hutan, implementasi praktik pengelolaan terbaik, patroli hutan, dan pengembangan kebijakan dan kelembagaan yang secara langsung mendukung pengelolaan hutan lestari.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan perbaikan dari efektivitas pengelolaan setidaknya 2,000,000 ha dari hutan tropis di bentang alam prioritas di Sumatra • Minimal 5 Rencana Pengelolaan dikembangkan • Minimal 2 RBM dikembangkan dan dilaksanakan • Minimal 5 PHBM baru dikembangkan dan setidaknya 10 dari kapasitasnya diperbaiki • Minimal 2 Perda atau KLHS dari RTRW diterbitkan • Minimal 50 badan/instansi pemerintahan setempat terlibat dalam program TFCA-Sumatera • Minimal 20 tenaga kerja Taman Nasional/KSDA terlatih • Minimal 5 kebijakan yang mendukung konservasi diterbitkan • Minimal 10 perusahaan/kesatuan swasta terlibat • Setidaknya 3 hubungan kerjasama yang telah dijalin dipertahankan, 1 hubungan baru didirikan • Setidaknya 1 proposal pendirian area konservasi baru atau 1 proposal untuk memperpanjang area konservasi yang telah ada diajukan kepada Kementerian Lingkungan & Kehutanan.

INTERVENSI STRATEGIS	HASIL YANG DIHARAPKAN	SASARAN DAN INDIKATOR
<p>KONSERVASI BENTANG ALAM DAN SPESIES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontribusi terhadap pengurangan penggundulan hutan dan degradasi hutan setidaknya 10% di bentang alam prioritas (sesuai dengan target yang seperti diuraikan sebagaimana disebutkan di paragraf 1) 2) Melindungi setidaknya 800,000 ha dari habitat spesies langka yang mengandung populasi minimum dari harimau, badak, orangutan, dan gajah. 3) Secara umum, berkontribusi dalam pengurangan laju penurunan populasi harimau, badak, orangutan, dan gajah setidaknya 50% dari angka saat ini dan menstabilisasi populasi minimum dalam bentang geografis yang ada saat ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 5 unit atau 1000 ha PHBM baru dikembangkan dan setidaknya 30 unit atau 50.000 ha PHBM yang telah ada diperbaiki • Minimal 2 konsesi swasta baru mengimplementasikan sertifikasi BMP, HCVF, atau BBOP. • Minimal 500 ha area restorasi hutan yang telah ada dipertahankan, setidaknya 300 ha hutan yang telah mengalami degradasi dipulihkan pada tahap awal, dan 20.000 lahan kritis (non-hutan) direhabilitasi • Minimal 800.000 ha kawasan lindung terlindungi dengan patrol dan pengamatan intensif • Setidaknya pemeliharaan populasi yang ada (terhitung 2007 sebagaimana tercantum di dokumen MoF) dari spesies-spesies langka yang utama adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Harimau di 5 bentang alam - Badak di 3 bentang alam - Gajah di 5 bentang alam - Orangutan di 3 bentang alam • Minimal 1 fasilitas konservasi ex-situ untuk spesies langka, seperti badak, diperbaiki • Komunitas berdasarkan unit peringanan konflik manusia-satwa di setidaknya 2 bentang alam didirikan atau diperbaiki • Setidaknya 1 pemerintahan setempat dan 1 perusahaan swasta ikut menyumbang untuk fasilitas peringanan konflik manusia-gajah. • Insiden-insiden kejahatan terhadap satwa berkurang setidaknya 30% (terhitung 2014) • Insiden-insiden atau kerugian dari konflik manusia-satwa berkurang setidaknya 10% di 3 bentang alam (terhitung 2014) • Setidaknya 100 ha spesies invasif diberantas.

INTERVENSI STRATEGIS	HASIL YANG DIHARAPKAN	SASARAN DAN INDIKATOR
<p>PENGEMBANGAN KOMUNITAS</p>	<p>3) Meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 10% [setiap tahunnya] di beberapa area yang dituju dan</p> <p>4) Memperbaiki setidaknya 10 kelompok komunitas dalam kapasitas ekonomi, yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak positif kepada konservasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 30 masyarakat setempat dipromosikan sebagai juara konservasi • Minimal 10 kelompok PHBM berkapasitas organisasi dan teknis pengelolaan hutan diperbaiki • Minimal 10% kenaikan pendapatan rumah tangga (terhitung 2014) • Minimal 20 koperasi/lembaga keuangan mikro didirikan/diperbaiki • Minimal 30 perusahaan swasta ikut serta dengan komunitas-komunitas dengan tujuan untuk menyalurkan produk-produk komunitas • Setidaknya 250 kelembagaan ekonomi setempat membantu perbaikan sistem produksi (pertanian-kehutanan, kelompok petani, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, koperasi, kelompok usaha bersama) • Setidaknya 2 unit peringanan konflik manusia-satwa diperbaiki • Minimal 25 kelompok ekonomi setempat membantu dalam melaksanakan skema nilai tambahan • 75 kelompok petani setempat memperbaiki sistem bertani mereka • Minimal 20 kelompok melaksanakan skema pelayanan ekosistem (Ekowisata, pico/micro hydro, pelayanan air komersil, dll.) • Minimal 20 kelompok dari produk HHNK didirikan/diperbaiki • Setidaknya 2 jurnal ilmiah, 3 buku dan 2 film diproduksi dan diterbitkan

Bab 5
**PENDEKATAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN PROGRAM**



5.1. Pendekatan Strategis

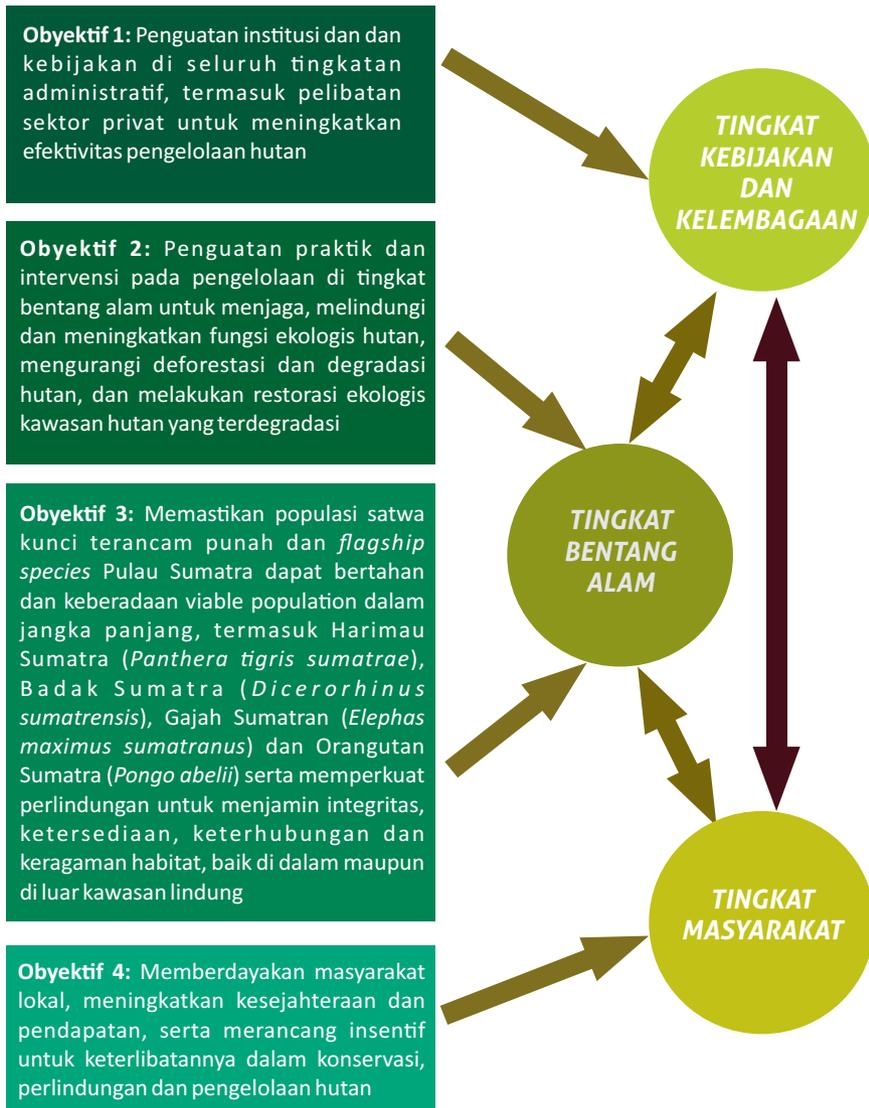


Sebagaimana telah disebutkan di Bab III, tujuan utama rencana strategis akan diterapkan pada tiga tingkat intervensi, yaitu tingkat kebijakan dan kelembagaan, bentang alam dan masyarakat. Pemetaan tujuan utama dalam tingkat-tingkat intervensi tersebut dapat dilihat di Gambar 9.

Intervensi pada tingkat kelembagaan dan kebijakan akan dilakukan dengan menciptakan kondisi pemungkin kegiatan konservasi, termasuk pembentukan peraturan dalam setiap tingkat. Walaupun berfungsi sebagai pendukung penguatan intervensi, kebijakan dan kelembagaan tidak kalah penting karena konservasi tentunya membutuhkan komitmen politis yang harus dipindahkan ke dalam kebijakan formal dan tertulis.

Intervensi pada tingkat bentang alam adalah bagian utama dalam usaha konservasi karena intervensi ini merubah secara langsung kondisi konservasi saat ini menjadi yang lebih baik.

Akhirnya, intervensi pada tingkat masyarakat juga penting dalam tindakan konservasi karena masyarakat sekitar biasanya adalah yang paling terpengaruh dan peningkatan mata pencaharian telah terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pencapaian konservasi. Selain daripada itu, TFCA-Sumatera akan dan telah mendukung dan menghubungkan dengan peraturan dan perencanaan internasional, strategi dan prakarsa, termasuk CBD, perubahan iklim, pemberantasan kejahatan liar, dan sebagainya.



Gambar 9. Pendekatan strategis TFCA-Sumatera yang ditunjukkan melalui Obyektif dan tingkat intervensi yang berkaitan.

5.2. Mendukung dan Mengaitkan dengan Prioritas Konservasi Nasional dan Internasional

Sebagaimana telah dilakukan sebelumnya, TFCA-Sumatera akan terus mendukung dan menghubungkan kepada prioritas konservasi nasional. Beberapa contoh dari prioritas konservasi nasional tersebut yaitu:

Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). IBSAP merupakan rencana nasional yang dikembangkan dari mandat Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indonesia saat ini menggunakan IBSAP 2003-2020 sebagaimana telah diamandemen menjadi IBSAP 2015-2020. TFCA juga dapat mendukung pelaksanaan rencana nasional ini dan pembentukan kebijakan lebih lanjut mengenai konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan berkelanjutan.

Strategi nasional dan rencana aksi untuk konservasi beberapa spesies langka. Kementerian Kehutanan yang sebelumnya telah mengembangkan dan melakukan strategi konservasi nasional beberapa spesies yang dilindungi, seperti badak, harimau, orangutan, dan gajah Sumatra. Strategi dan rencana pelaksanaan ini mencakup: 1) Strategi dan Rencana Kegiatan untuk Harimau Sumatra 2007-2017; 2) Strategi dan Rencana Kegiatan untuk Gajah Kalimantan 2007-2017; 3) Strategi dan Rencana Kegiatan untuk Gajah Sumatra dan Kalimantan 2007-2017; 4) Strategi dan Rencana Kegiatan untuk Orangutan Indonesia 2007-2017. Ada beberapa strategi dan rencana kegiatan lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan dan TFCA akan ikut serta dalam pelaksanaan strategi dan rencana-rencana tersebut.

Selain daripada itu, penting bahwa TFCA-Sumatera juga hendaknya mendukung dan mengaitkan programnya dengan Prioritas dan Target Konservasi Global. Dalam pendekatan untuk mencapai target konservasi, TFCA-Sumatera telah berkontribusi kepada target-target internasional sebagai bagian dari tujuan strategis TFCA. TFCA akan terus berkontribusi dan menghubungkan kepada target dan pelaksanaan konservasi internasional. Hal ini mencakup:

- **Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD).** Kontribusi dan kaitan dengan target-target CBD mencakup kontribusi kepada program-program kerja di wilayah yang dilindungi, keanekaragaman hayati hutan, perairan di pedalaman, pemberantasan spesies asing yang invasif, masyarakat lokal dan adat, serta konservasi in-situ dan ex-situ.

- *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Ada berbagai pedoman besar yang dihasilkan oleh IUCN tentang konservasi keanekaragaman hayati serta program-program dan tujuan IUCN. Dalam hal ini, TFCA akan menggunakan pedoman-pedoman ini sebagai referensi dalam pelaksanaan program TFCA.
- *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. TFCA-Sumatera akan mendukung tujuan CITES terutama dalam mendukung temuan yang tidak merugikan sebagaimana dimandatkan pada Pasal III dan IV dan mendukung pemberantasan kejahatan terhadap hidupan liar dalam semua mekanisme rantai perdagangan.
- *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*. TFCA-Sumatera tidak dirancang untuk mengimplementasikan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim secara langsung. Namun, kegiatan konservasi dapat secara langsung berkontribusi kepada pencapaian tujuan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Contohnya, sebelumnya TFCA-Sumatera mendukung proyek-proyek yang berhubungan dengan kehijauan dan energi yang dapat diperbaharui melalui pembangunan pembangkit listrik *pico-hydro* dan perlindungan hutan yang mendukung Pengurangan Emisi dari Penggundulan dan Degradasi Hutan (*Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation/REDD*).

5.3. Memberantas Kejahatan terhadap Hidupan Liar

Menyusul Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia Pemerintah Amerika Serikat mengenai Konservasi Hidupan Liar dan Memberantas Perdagangan Satwa Liar, sebuah rencana aksi telah dikembangkan. TFCA-Sumatera akan mendukung implementasi rencana aksi ini dalam situasi yang tepat dan memungkinkan.

5.4. Memperkuat Keikutsertaan dan Kontribusi Sektor Swasta dalam Konservasi

Sektor swasta saat ini muncul sebagai pemegang peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati di negara ini. Usaha-usaha seperti pembangunan Cagar Biosfir Giam-Siak melalui keterlibatan PT. Sinarmas dan implementasi area bernilai konservasi tinggi oleh perusahaan-perusahaan kayu dan tambang telah meningkatkan kesadaran pada berbagai sektor dalam masyarakat. Sektor industri telah menunjukkan minat yang besar dalam

memperbaiki keterampilan dan praktik mereka untuk mengurangi dampaknya kepada lingkungan. Sektor swasta telah lama memberikan contoh kontribusi dalam pengelolaan dan konservasi di negara ini. Contohnya, walaupun hasil yang mengecewakan, implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan dengan Hak Pengusahaan Hutan adalah salah satu dari kontribusi sektor swasta dalam konservasi. Sektor swasta kini menyadari pentingnya ekosistem strategis dan kawasan lindung untuk proses produksi mereka dan telah memobilisasi sumber daya dan membangun kerjasama untuk mendorong perancangan dan implementasi strategi konservasi kawasan lindung dan margasatwa. Hal ini tepatnya yang memotivasi banyak usaha. Dalam hal ini, alat-alat harus disediakan oleh kerangka hukum dan peraturan untuk memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dengan kontribusi langsung yang ditujukan untuk membiayai fasilitas konservasi tertentu yang mengimplikasikan pengelolaan yang sesuai terhadap tindakan konservasi umum dan swasta, contohnya kawasan lindung dan ekowisata. Berdasarkan alasan-alasan inilah TFCA-Sumatera mendukung keikutsertaan sektor swasta dalam konservasi.

Penting untuk mengacu kepada pedoman IUCN dalam keterlibatan sektor swasta, contohnya “IUCN (2009): Pedoman Operasional untuk Keikutsertaan Sektor Swasta”. Namun, pada dasarnya strategi yang dijalankan mencakup:

- 1) Mengarahkan sektor swasta dalam melaksanakan praktik pengelolaan terbaik (BMP) bila memungkinkan menerapkan sistem sertifikasi yang sesuai.
- 2) Melalui CSR, ikut serta dalam kegiatan konservasi sesuai dengan dana TFCA;
- 3) Mengembangkan pengganti kerugian (*offset*) keanekaragaman hayati (karbon).

5.5. Membangun Sinergi dengan Upaya Konservasi yang Lebih Luas

TFCA-Sumatera akan mengidentifikasi donor lain, termasuk Pemerintah dan LSM, atau akan bekerja di bentang alam yang sama atau kegiatan yang serupa. Dalam hal ini, TFCA-Sumatera tidak menyediakan hibah yang secara langsung tumpang tindih dengan yang telah disediakan atau akan disediakan oleh donor yang lain. Selain itu, hibah tambahan yang akan berkontribusi kepada pencapaian tertentu dalam pekerjaan yang tumpang tindih atau akan mempunyai dampak konservasi yang lebih signifikan lebih diutamakan untuk ditunjang.

Sebagai contoh, Disney Foundation saat ini mendukung LSM Indonesia dengan fokus pada kegiatan konservasi harimau dan badak Sumatra di tingkat perencanaan. Dalam hal ini, TFCA-Sumatera dapat berbagi kegiatan secara strategis. Hal yang sama dapat juga dilakukan dengan bentang alam Koridor Rimba di provinsi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat yang telah menerima hibah GEF melalui proyeknya yang berjudul “Memperkuat hubungan hutan dan ekosistem di bentang alam RIMBA di bentang alam Sumatera Bagian Tengah melalui investasi pada modal alam (*natural capital*), konservasi keanekaragaman hayati, dan pengurangan emisi berbasis lahan” (*'RIMBA project'*). Lokasi Proyek RIMBA juga mencakup beberapa bentang alam yang diprioritaskan TFCA, antara lain Taman Nasional Kerinci-Seblat, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Berbak, serta daerah penyangga dan penghubung, yang akan melindungi habitat penting bagi spesies gajah, harimau, dan burung.

5.6. Keberlanjutan Program dan Proyek Konservasi

Menjaga kesinambungan program konservasi adalah bagian yang penting dari strategi TFCA-Sumatera untuk pencapaian tujuan secara keseluruhan. Program-program konservasi ini harus tetap berjalan walaupun proyek yang berada di bawah tunjangan TFCA telah dihentikan. Dalam hal ini, kesinambungan tidak harus dalam bentuk proyek yang terus berjalan, tapi lebih dalam bentuk kegiatan, fungsi, atau manfaat dari proyek yang akan terus ada setelah proyeknya dihentikan.

Oleh karena itu, kesinambungan hendaknya ditempatkan dengan badan yang akan menetap di lokasi proyek untuk kurun waktu yang lama. Badan-badan ini dapat berupa: masyarakat setempat, pemerintahan setempat, sektor swasta, dan LSM lokal. Mengingat fakta ini, pelaku yang akan dapat menjaga kesinambungan adalah mereka yang menetap di tingkat setempat untuk waktu yang lama. Kesinambungan dalam tingkat proyek terdiri dari (1) pengembangan atau integrasi proyek-proyek yang menghasilkan kegiatan mandiri; dan (2) pengembangan proyek yang dinyatakan akan dipertahankan oleh Pemerintah atau hubungan dengan sektor swasta. Kegiatan yang diutamakan untuk mendukung kesinambungan adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi di tingkat setempat yang sebagai gantinya mendukung konservasi, dalam konteks proyek konservasi mandiri. Di bawah ini merupakan beberapa contoh kegiatan dan strategi yang akan dikembangkan untuk mendukung kesinambungan program/proyek TFCA.

- **Mendukung Social Enterprise (ekonomi kreatif berbasis potensi lokal).** Administrasi Pemerintah yang baru memberikan prioritas tinggi pada perkembangan potensi setempat. Perusahaan sosial yang mengacu pada potensi setempat, terutama pada tingkat situs, akan diprioritaskan melalui program TFCA-Sumatra.
- **Mempromosikan pengembangan ekowisata.** Sumatra memiliki potensi ekowisata yang sangat besar, mulai dari ekosistem hutan hujan tropis, margasatwa, masyarakat, dan budayanya. Kekayaan ini hanya membutuhkan pengemasan, pengelolaan, dan promosi untuk menjadi paket ekowisata yang dapat dijual. Penguatan dan pengembangan ekowisata akan dilaksanakan sejalan dengan budaya dan nilai-nilai setempat.
- **Merealisasikan jasa lingkungan.** Dua potensi jasa lingkungan yang dapat tersedia dalam waktu singkat adalah air dan karbon. TFCA-Sumatera saat ini menunjang penggunaan air, misalnya untuk membangun pembangkit listrik pico-hydro untuk mendukung pengembangan energi ramah lingkungan (*green energy*). Pekerjaan konservasi hutan di masa depan hendaknya dihubungkan dengan perimbangan emisi (*carbon offset*) yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Ketika jasa lingkungan memiliki hasil yang signifikan di tingkat tapak, pada gilirannya masyarakat dan pemerintah setempat, akan secara sukarela melindungi hutan yang bermanfaat bagi mereka.
- **Memaksimalkan dana (Leveraging Funds).** Pekerjaan konservasi yang ditunjang TFCA-Sumatera bertujuan untuk menarik perhatian untuk pendanaan dari donor lain, sektor swasta, dan pemerintah. Dalam hal ini, komunikasi antara mitra, calon donor dan pemerintah perlu dibangun untuk meningkatkan dukungan (*buy-in*) dan keikutsertaan mereka dalam program konservasi. Untuk alasan ini TFCA hendaknya membangun komunikasi dan jaringan antara mitra dan pemangku kepentingan lain di tingkat lokal. Sebagai bagian dari tanggungjawab bersama pemerintah setempat sebagaimana diamanatkan melalui UU Desentralisasi, konservasi alam harus diberikan prioritas utama setempat. Oleh karena itu, penguatan keikutsertaan pemerintah dan *buy-in* konservasi menjadi penting untuk memungkinkan pemerintah setempat untuk berkontribusi dalam alokasi dana kegiatan konservasi.

- **Kontribusi masyarakat (in-kind)**. Kesenambungan proyek, kegiatan maupun manfaatnya, harus dibangun dengan adanya kontribusi dari pemangku kepentingan dan masyarakat setempat kepada proyek atau kegiatan. Kontribusi ini akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek atau kegiatan.
- **Membentuk Dana Perwalian (Trust Fund) Sumatra-Konservasi Hutan Tropis**. Dana Perwalian TFCA adalah dana pembayaran utang, sehingga implementasi pendanaan ini hendaknya selesai sekitar tahun 2021. Perjanjian TFCA tidak menentukan bagaimana akhir program TFCA setelah peraturan Pemerintah Indonesia tentang pengarahannya kembali pembayaran utang yang diselesaikan tahun 2021. Melihat bentuk hibah TFCA Sumatera saat ini, ada kemungkinan bahwa program ini tidak selesai pada saat itu. Salah satu penerima dana TFCA telah membentuk dana perwalian konservasi di Sumatra Utara. Penting bahwa TFCA mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk dana perwalian dalam tingkat setempat, dengan memberikan tunjangan dan bimbingan kepada dana perwalian yang baru dibentuk atau yang sedang berkembang berdasarkan apa yang dipelajari dari praktik terbaik program TFCA. Hal ini akan membangun kesinambungan dalam tingkat pendanaan untuk memastikan kemampuan pendanaan jangka panjang untuk kegiatan konservasi.

5.7. Mengaitkan dengan Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah

Mendukung pengembangan dan implementasi tata ruang yang selaras dengan nilai-nilai ekologis akan menjadi salah satu prioritas TFCA-Sumatera dalam lima tahun ke depan. Selain itu, TFCA-Sumatera akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut akan diarahkan untuk mendukung dan memiliki kaitan dengan rencana pembangunan berkelanjutan pemerintah provinsi maupun kabupaten. TFCA-Sumatera akan melanjutkan untuk menitikberatkan pada keberlanjutan proyek dan program, salah satunya dengan mendukung IKU pemerintah, khususnya Unit Pengelola Terpadu (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Balai Taman Nasional dan BKSDA. Serta dengan tidak melupakan pelibatan sektor swasta yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan capaian kegiatan konservasi.

5.8. Membangun Kapasitas LSM dan Komunitas Konservasi Lainnya

Membangun kapasitas adalah bagian dari pengembangan institutional bagi para penerima hibah. TFCA akan mendampingi penerima hibah yang baru diterima dengan rancangan proyek dan pelatihan keuangan, termasuk pembukuan. Pelatihan mengenai hal-hal teknis akan digelar secara rutin selama program hibah berlangsung, terutama pada koreksi dan temuan selama monitoring dan evaluasi. Administrator juga akan melaksanakan kegiatan *shared-learning* dimana para mitra penerima hibah dapat saling berbagi kisah sukses sebagai model yang dapat dipelajari. Pembangunan kapasitas bagi penerima hibah atau calon penerima hibah adalah salah satu langkah penting yang harus diambil dan akan terus dilakukan oleh Administrator. Fasilitator Wilayah, akan saling berkoordinasi untuk mengadakan pembangunan kapasitas bagi penerima hibah bila dibutuhkan. Salah satu topik penting adalah kewirausahaan sosial dan pembangunan *exit strategy* yang harus disertakan dalam proyek sejak proses perancangannya. Melalui Fasilitator-fasilitator Wilayahnya, TFCA Sumatera akan bertanggungjawab untuk menyediakan dukungan pengembangan bisnis usaha sosial kepada penerima hibah sehubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat, contohnya melalui pengembangan bisnis, pemasaran produk, dan pengelolaan bisnis lainnya. Di samping itu, fasilitator wilayah akan membantu penerima hibah dalam mengembangkan *exit strategy* dan keberlangsungan proyek setelah bantuan TFCA berakhir.

Bab 6
**KRITERIA DAN PENDEKATAN
PEMBERIAN HIBAH**



6.1. Proses Pemberian Hibah



Strategi pemberian hibah yang diterapkan oleh TFCA Sumatera saat ini menekankan pada intervensi bentang alam berskala besar. Hibah yang besar dibuat berdasarkan visi dari Oversight Committee yang mengarah pada dampak konservasi yang signifikan pada tingkat bentang alam. Agar dapat mencapai dampak yang signifikan, sebuah intervensi konservasi harus dilaksanakan melalui kerjasama, termasuk dengan membangun konsorsium antar LSM. Ketiga tingkat intervensi (kelembagaan, bentang alam, dan pengembangan masyarakat) dapat dilaksanakan pada saat yang bersamaan melalui sebuah konsorsium yang terintegrasi. Selain itu, keuntungan dari melaksanakan hibah besar melalui sebuah konsorsium adalah sebuah proyek dapat ditangani oleh banyak organisasi melalui visi yang sama. Meskipun demikian, membangun sebuah konsorsium bukanlah hal mudah. Konsorsium harus dibangun melalui proses *bottom up* yang seringkali memakan waktu. Kegagalan dalam membangun visi yang sama antar anggota konsorsium dapat berujung pada kegagalan dalam melaksanakan proyek tersebut. Selain itu, organisasi pemimpin haruslah memiliki kepemimpinan yang kuat dalam mengelola proyek maupun konsorsium. Seperti yang telah dijelaskan dalam Perjanjian Konservasi Hutan, TFCA hanya dapat menghibahkan dana pada badan-badan yang memenuhi syarat dan hanya untuk kegunaan resmi yang telah ditetapkan

6.1.1. Tata Kelola Penerima

Sejalan dengan persyaratan Perjanjian Konservasi Hutan, TFCA menganjurkan agar, khususnya untuk hibah besar, calon mitra memenuhi syarat dapat bekerja dalam sebuah konsorsium yang dibangun melalui proses *bottom up* dan dengan komitmen yang kuat untuk bekerja secara kolaboratif. Namun, untuk hibah yang lebih kecil, lembaga-lembaga tersebut memiliki kemungkinan untuk menerima hibah jika badan tersebut dapat menunjukkan konsep aktivitas yang baik. Dalam hal ini, Administrator dan *Oversight Committee* harus memberikan bantuan dan layanan-layanan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mungkin termasuk bantuan dalam pembangunan konsorsium, pelatihan keuangan dan administratif, pengembangan rencana monitoring kinerja, dan bantuan-bantuan lainnya yang termasuk dalam cakupan pekerjaan Administrator.

Idealnya, penerima hibah yang melakukan aktivitas-aktivitas konservasi di bawah payung TFCA haruslah dalam bentuk konsorsium yang terdiri dari dua organisasi atau lebih sesuai keahlian masing-masing dan memiliki misi yang sama dalam mengembangkan program konservasi. Hibah besar yang meliputi berbagai tingkat konservasi akan lebih efektif bila dilaksanakan oleh sebuah konsorsium. Meski demikian, fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa pengembangan sebuah konsorsium yang kuat merupakan tantangan yang harus diatasi dan sering berakhir dalam kegagalan karena kurangnya tata kelola organisasi yang baik. Oleh karena itu, sebuah konsorsium harus dibangun di bawah visi yang sama di antara anggota-anggotanya. *Oversight Committee* dan Administrator tidak boleh memaksa pembentukan sebuah konsorsium hanya berdasarkan akan kesamaan proposal atau bentang alam. Maka dari itu, sebuah konsorsium harus dibangun melalui proses *bottom up* di bawah visi yang sama di antara anggota-anggotanya. Dalam hal ini, Administrator harus terus menerus menyediakan bantuan untuk memperkuat tata kelola konsorsium.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, organisasi-organisasi individu harus diberikan kesempatan untuk menerima hibah besar setelah proses penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan administratif serta rekam jejak organisasi tersebut dalam mengelola hibah-hibah yang pernah diterima. Untuk hibah sedang dan kecil, harus ada pembatasan dalam bentuk penerima hibah baik dalam bentuk konsorsium atau organisasi individu. Bentuk organisasi penerima hibah dapat berupa konsorsium yang terdiri dari dua atau lebih organisasi mandiri, dibangun melalui proses *bottom up* demi misi yang sama, atau berupa organisasi tunggal yang memenuhi persyaratan.

Administrator akan melanjutkan proses untuk membantu calon penerima hibah dalam memperbaiki proposal setelah *Oversight Committee* secara prinsip menyetujui permohonan hibah. Pada siklus hibah pertama dan kedua, sesuai amanat *Oversight Committee*, Administrator menyediakan dana sekitar 5.000 dolar AS untuk mengadakan lokakarya dalam mengembangkan proposal dan merancang proyek. Dana ini diberikan pada penerima hibah yang dokumen-dokumen konsepnya telah disetujui. Akan tetapi sejak peluncuran siklus hibah ketiga, Administrator mengubah proses ini, sehingga pemohon hibah harus mengajukan proposal lengkap secara langsung alih-alih dokumen konsep. Dalam hal ini, Administrator menyediakan pedoman pengembangan proposal dan perancangan proyek, termasuk pengembangan kerangka logis rencana kerja dan Rencana Monitoring Kinerja (Performance Monitoring Plan – PMP). Selain itu, penerima hibah harus menerima pelatihan untuk melakukan input data ke sistem basis data yang dikembangkan oleh Administrator.

Bantuan pelatihan keuangan dan pembukuan yang diberikan pada penerima hibah akan diberikan secara rutin setelah penandatanganan Perjanjian Hibah. Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari staf keuangan penerima hibah dalam pembukuan dan pengelolaan keuangan proyek, namun juga untuk standarisasi mekanisme keuangan seperti perangkat lunak (*software*) yang digunakan, SOP keuangan, dan prosedur pelaporan agar sama dengan yang ada di kantor Administrator.

6.1.2. Penerimaan Proposal dan Proses Hibah

6.1.2.1. Penerimaan Proposal

- a. **Tetap menerima proposal melalui penerimaan terbuka untuk proposal/dokumen konsep**
Metode pengumpulan proposal melalui proses *bottom up* melalui peluncuran permintaan dokumen konsep atau permintaan proposal harus tetap dijalankan, baik di dalam maupun di luar siklus hibah.
- b. **Penerimaan proposal melalui penetapan target penerima hibah**
Seandainya tidak ada proposal yang diajukan dari permintaan terbuka dalam isu-isu tertentu yang dianggap penting bagi pencapaian TFCA, Administrator (dengan persetujuan *Oversight Committee*) dapat menunjuk organisasi-organisasi tertentu yang diketahui mampu melaksanakan tugas tersebut.
- c. **Penerimaan melalui penetapan target aktivitas/isu**
Berdasarkan analisis evaluasi pada akhir proyek, Administrator dapat memberikan hibah kepada penerima-penerima yang terpilih dengan pertimbangan hibah tersebut dapat meningkatkan besarnya dampak konservasi. Hibah juga dapat diberikan pada sebuah organisasi untuk melaksanakan aktivitas sasaran tertentu.

6.1.2.2. Jadwal Penerimaan Proposal dan Proses Pemberian Hibah (Siklus Hibah)

a. **Siklus hibah/penumpulan proposal terjadwal**

Penerimaan proposal yang terjadwal dibuka dua kali dalam setahun untuk hibah besar, sedang, dan kecil. Hal ini biasanya didiskusikan dan dipertimbangkan dalam rapat/pertemuan rutin *Oversight Committee*. Perjanjian Konservasi Hutan mengindikasikan bahwa kedua pertemuan harus dilaksanakan sekitar bulan Maret dan September. Walaupun begitu, mengolah proposal hingga diterima sebagai hibah seringnya memakan waktu. Hingga, kedua waktu ini akan digunakan sebagai tanggal acuan.

b. **Off cycle/penumpulan proposal di luar jadwal**

TFCA-Sumatera memungkinkan penerimaan proposal tertentu di luar siklus. Penerimaan ini harus selaras dengan kondisi yang diuraikan sebelumnya, dimana hibah akan diberikan pada mitra atau lokasi tertentu dengan pertimbangan hibah dapat meningkatkan dampak konservasi. Keputusan mengenai hibah akan tetap diambil oleh *Oversight Committee*, baik melalui pertemuan biasa maupun cara-cara komunikasi lain seperti korespondensi elektronik, konferensi telepon, dan lain lain.

6.1.3. Besaran Hibah

Sesuai dengan metode penerimaan proposal, TFCA membagi hibah menjadi tiga besaran pendanaan yaitu hibah besar, sedang, atau kecil. Besaran yang disebutkan berikut ini hanya merupakan sebuah indikasi dan *Oversight Committee* akan melakukan peninjauan bila diperlukan dan didokumentasikan dalam *Grant Making Policy and Procedure* (GMPP).

Tidak ada batasan tentang besaran hibah, namun berdasarkan pengalaman saat ini hibah biasanya berkisar antara Rp. 1 Miliar – Rp. 7 Miliar dalam jangka waktu 1-5 tahun tergantung pada tujuan intervensi. TFCA-Sumatera juga dapat menyediakan hibah sebesar kurang dari Rp 1 Miliar, bahkan hibah sangat kecil sebesar kurang dari Rp. 100 Juta untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas konservasi kecil yang dapat menghasilkan dampak konservasi atau untuk aktivitas-aktivitas yang dapat mengisi kekosongan intervensi (aktivitas *low-hanging fruit dan quick win*).

6.1.4. Sub-Hibah (Sub-Grant)

Sesuai dengan peraturan pemberian hibah, Administrator tidak dapat memberikan hibah secara langsung pada kelompok-kelompok maupun masyarakat setempat. Pada beberapa contoh, masyarakat dan kelompok lokal telah mampu mengelola proyek sendiri. Dalam hal ini, LSM atau konsorsium penerima hibah dapat menyediakan sub-hibah (*sub-grant*) kepada masyarakat setempat atau LSM lainnya. LSM tersebut harus membantu masyarakat dengan tanggung jawab atas dana yang digunakan.

6.1.5. Modifikasi Hibah yang Sedang Berjalan

Keadaan mungkin saja berubah. Contohnya, dapat terjadi perubahan pada hukum atau peraturan pemerintah atau situasi tak terduga lainnya yang mengharuskan berubahnya hibah. Perubahan hibah dapat berupa perpanjangan tanpa biaya, perubahan pada besaran hibah (pemusatan ulang), perpanjangan hibah dengan biaya tambahan, dan perencanaan ulang hibah. Bergantung pada alasan perubahan yang diajukan, perubahan hibah oleh TFCA adalah sebagai berikut.

a. **Perpanjangan durasi kerjasama tanpa dana tambahan (Extension with no cost)**

Perpanjangan durasi atau perubahan pada proyek tanpa dana tambahan mungkin diberikan pada penerima hibah yang sedang berjalan dimana mereka dinilai tidak dapat menyelesaikan proyek pada jangka waktu yang telah ditentukan yang disebabkan oleh situasi internal maupun eksternal. Jangka waktu perpanjangan program tidak lebih dari enam bulan untuk proyek yang berdurasi 3 tahun atau lebih, dan realokasi anggaran mungkin diizinkan.

b. **Perpanjangan durasi kerjasama dengan penambahan dana hibah**

Perpanjangan atau perubahan proyek dengan penambahan dana mungkin diberikan pada penerima hibah yang sedang berjalan dimana penerima hibah sepertinya tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai jadwal dikarenakan oleh keadaan-keadaan tak terduga di luar kuasa penerima hibah seperti perubahan hukum atau peraturan pemerintah. Dalam situasi ini, dengan memperpanjang proyek, dampak konservasi yang diharapkan mungkin tercapai dan sebaliknya, memberhentikan proyek dapat menghasilkan kerugian yang lebih besar.

6.1.6. Pemberian Hibah Tambahan pada Hibah yang Sedang Berjalan

Peraturan pemberian hibah yang berlaku saat ini tidak mengizinkan mitra penerima hibah yang sedang berjalan untuk menerima hibah lainnya. Akan tetapi, khusus untuk dana tambahan TFCA untuk membiayai konservasi spesies terancam punah, mitra yang sedang berjalan dapat menerima hibah dari TFCA-Sumatera di bawah perjanjian baru. Dalam hal ini, Administrator dan OCTM (dibantu oleh *Technical Assistant*) harus menilai kemampuan calon penerima hibah. Dalam memberikan hibah, Administrator harus menerapkan asas keadilan. Saat ini peraturan untuk memberikan hibah pada mitra yang sedang berjalan hanya dapat diaplikasikan untuk hibah yang berkonsentrasi pada konservasi spesies terancam punah.

6.1.7. Memperkuat Monitoring, Evaluasi, dan Membangun Kapasitas

Implementasi pemberian hibah TFCA-Sumatera telah berjalan selama sekitar 3 tahun sejak pencairan hibah pertama pada kuartal pertama tahun 2011. Saat ini, TFCA Sumatera mengelola 22 penerima hibah dari 4 siklus hibah yang kebanyakan terdiri dari hibah besar (lebih dari Rp. 5 Miliar). Peningkatan jumlah mitra penerima hibah telah menumbuhkan kekhawatiran pada administrator mengenai beban kerja yang tinggi dalam hal monitoring dan evaluasi (MONEV) serta rekam jejak kemajuan oleh penerima hibah. Pembatasan anggaran dalam mengelola manajemen, membuat Administrator tidak dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi hibah, termasuk M & E, pembangunan kapasitas, dan pekerjaan administratif lainnya.

Dalam hal ini, *Oversight Committee* setuju untuk mengembangkan fasilitator wilayah dalam bentuk hibah yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada area-area penting sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan bantuan untuk para penerima hibah demi implementasi proyek yang efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan TFCA. Monitoring, evaluasi dan menyediakan bantuan bagi mitra untuk melakukan perbaikan kegiatan adalah aspek yang dianggap paling penting dari pengelolaan proyek.
- b. Meningkatkan efektivitas para penerima hibah dalam membangun kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi, mengingat pemerintah dan sektor swasta memegang peran penting dalam konservasi hutan.
- c. Meningkatkan kapasitas organisasi dan staf mitra penerima hibah untuk implementasi proyek yang efektif. Kedepannya, selain membangun kapasitas administratif, para penerima hibah harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keahlian teknis yang berhubungan dengan pekerjaan mereka di lapangan.

- d. Meningkatkan probabilitas kesuksesan dan keberlangsungan program melalui pengadaan bantuan teknis untuk para penerima hibah dalam hal-hal sosio-ekonomi, wirausaha sosial (*social business*), dan rencana penyelesaian proyek (*project exit strategy*).

6.2. Kriteria dan Prioritas Pemberian Hibah

Sesuai dengan *Schedule 7* dan *7A* di dalam *Forest Conservation Agreement* (sesuai amandemen), dana hibah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan *Authorized Purposes* yang tercantum dalam, atau bermanfaat langsung terhadap kawasan hutan tropis (*Tropical Forest Areas*) yang dijelaskan pada *Schedule 2*. Dalam memberikan penilaian terhadap proposal hibah, Administrator dan *Oversight Committee* harus menggunakan prioritasasi dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Proposal hibah harus memenuhi semua kriteria dasar seleksi, termasuk:
 - Menunjukkan rencana strategis dengan jelas.
 - Menunjukkan pemahaman tentang, dan menjelaskan, ancaman-ancaman konservasi dan keberlangsungan hasil (*outcomes*) aktivitas dalam jangka panjang.
 - Memuat objektif (*objectives*), luaran (*outputs*), kegiatan (*activities*), kerangka waktu (*timeframes*), dan capaian (*deliverables*) konservasi yang jelas.
 - Merinci biaya-biaya yang sesuai dengan kegiatan yang diajukan.
 - Memiliki rencana pemantauan dan evaluasi (*monev*) dampak konservasi.
 - Bila memungkinkan, mengajukan implementasi rencana pengelolaan/konservasi kawasan lindung dan koridor.
 - Bila memungkinkan, menunjukkan adanya dukungan dari organisasi-organisasi lain termasuk masyarakat setempat, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan serta sewajarnya melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok tersebut dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang diajukan.
 - Menunjukkan bahwa memiliki sumber dana yang memadai yang dapat membiayai kegiatan yang diajukan.
- 2) Pemohon hibah harus menunjukkan pengalaman dan kapasitas administratif dan teknis untuk menjalankan *Authorized Purposes* yang diajukan:
 - Pendekatan Teknis: Pemohon hibah harus dapat mengidentifikasi ancaman, tekanan, dan masalah-masalah lainnya serta cara menangani masalah-masalah tersebut.
 - Hasil yang jelas: Pemohon hibah harus dapat menjelaskan hasil-hasil yang dapat diukur dan indikatornya, serta rencana monitoring dan evaluasi.

- Kapasitas Teknis dan Administratif pemohon hibah.
 - Struktur dan komposisi anggaran.
 - Rekam jejak pemohon hibah.
- 3) Sesuai dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat.
- 4) Bermanfaat bagi konservasi hutan tropis, termasuk kemungkinan untuk:
- Berkontribusi pada konservasi spesies yang secara global terancam punah atau endemik, yang bergantung pada hutan tropis untuk habitatnya yang semakin kritis;
 - Berkontribusi pada konservasi ekosistem hutan alami dengan nilai konservasi tinggi yang terancam dan rentan terhadap kelangkaan;
 - Berkontribusi pada konservasi kawasan hutan yang mewakili tipe hutan di Indonesia;
 - Berkontribusi pada pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan tropis yang berkelanjutan;
 - Berkontribusi pada pengurangan ancaman pada, atau meningkatkan konektivitas antara kawasan-kawasan hutan tropis;
 - Berkontribusi pada penetapan kawasan lindung baru; dan
 - Berkontribusi secara langsung pada perbaikan pengelola Kawasan Lindung yang telah ada, baik dengan status publik, swasta, kota praja, atau komunal, serta memberikan kontribusi terhadap pemenuhan target konservasinya.

Proposal hibah yang memenuhi persyaratan Kriteria Dasar Seleksi akan diprioritaskan dengan berdasarkan pada prioritas biologis umum bagi setiap Kawasan Hutan Tropis.

6.3. Pengaman Sosial dan Lingkungan

Program TFCA-Sumatera mendukung usaha-usaha konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan lingkungan, dukungan implementasi hak asasi manusia, sosialisasi kesetaraan sosial dan gender, serta implementasi tata kelola sumber daya alam yang baik. Berdasarkan hal tersebut, TFCA Sumatera mengembangkan dan mengadopsi mekanisme pengamanan sosial dan lingkungan dalam implementasi proyeknya. Pengamanan ini bertujuan untuk menghindari resiko dan meminimalisir berbagai dampak negatif sosial dan lingkungan dalam penerapan programnya. Pengamanan ini pun penting bagi peningkatan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi pemegang saham serta bagi kesinambungan langkah-langkah konservasi dalam tingkat masyarakat. TFCA-Sumatera menyediakan pedoman tentang pengamanan ini dalam dokumen terpisah.

Seluruh penerima hibah wajib mematuhi prinsip-prinsip pengamanan dalam pelaksanaan proyek mereka. Selain penilaian teknis dan anggaran proyek yang diajukan, dalam proses seleksi pemohon hibah TFCA-Sumatera juga menilai kesiapan pemohon hibah dalam implikasi sosial dan lingkungan dari aktivitas atau proyek yang diajukan.

Prinsip-prinsip Pengamanan Sosial dan Lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati adat dan hak-hak masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat dan sumber daya alamnya;
- 2) Menjaga, memberdayakan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat berpendapatan rendah serta memastikan kesetaraan gender;
- 3) Menjaga kearifan dan praktik tradisional serta nilai budaya masyarakat lokal dan adat yang berhubungan dengan konservasi dan penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan dan jasa ekosistem, menghindari aktivitas yang merugikan keanekaragaman hayati, serta mendukung perkembangan yang berkelanjutan;
- 5) Memastikan partisipasi penuh dan aktif para pemegang saham dan pemilik hak, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, dan membangun kapasitas mereka;
- 6) Mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan, termasuk pertanggungjawaban, perwakilan, dan transparansi dalam informasi, prosedur, dan mekanisme.

Rincian pedoman dan indikator pengamanan sosial dan lingkungan akan diberikan dalam dokumen terpisah.

Bab 7
**PENGELOLAAN PROGRAM
DAN KELEMBAGAAN**



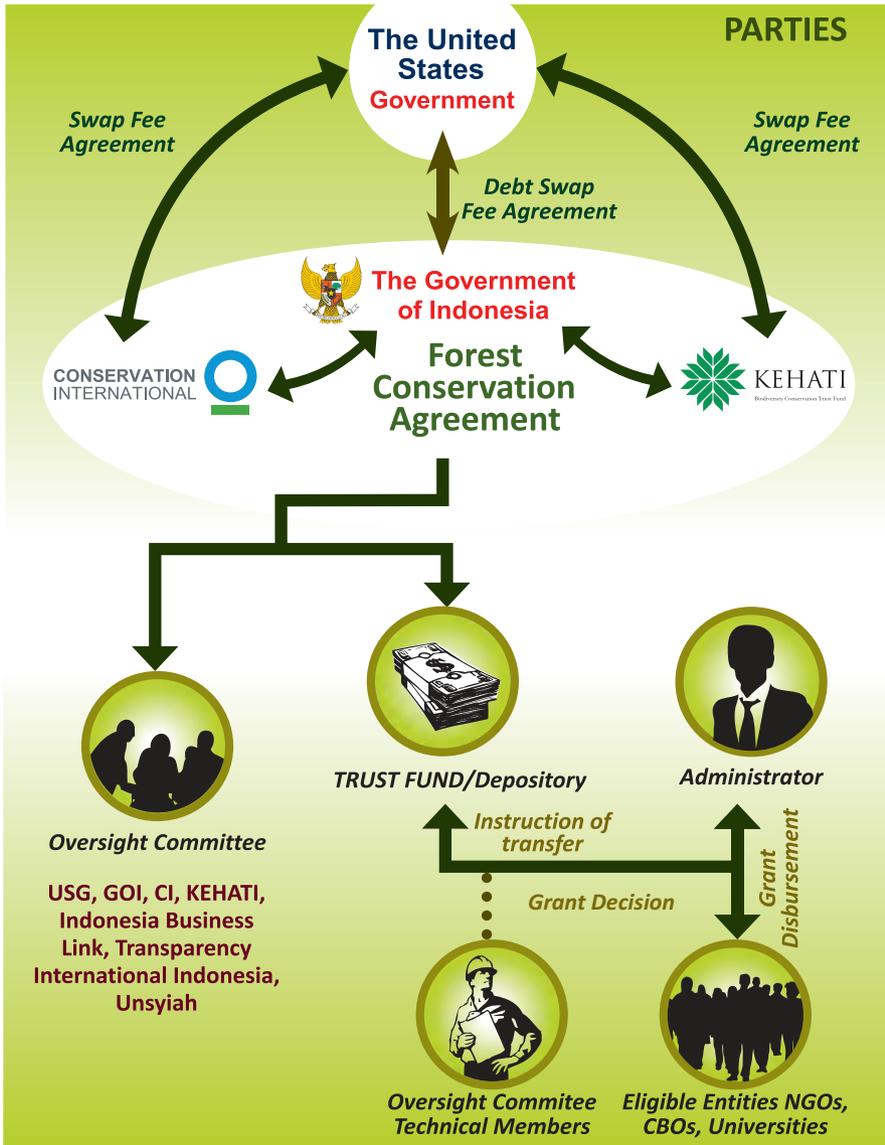
7.1. Struktur Manajemen Program



Struktur pengelola TFCA-Sumatera didasarkan pada tiga perjanjian, yaitu *Debt Swap Agreement*, *Swap Fee Agreement*, dan *Forest Conservation Agreement* antara pihak-pihak sebagaimana tertera pada bagan Gambar 10.

7.2. Personel

Pada tingkat Direksi, TFCA-Sumatera dipimpin oleh sebuah *Oversight Committee* yang terdiri dari tujuh (7) anggota yang memiliki hak suara (*voting members*). Keanggotaan dalam *Oversight Committee* dibagi menjadi dua kategori, yaitu Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap. Empat Anggota Tetap terdiri dari perwakilan para pihak, yaitu Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh USAID, perwakilan dari KEHATI, dan perwakilan dari Conservation International (CI). Tiga Anggota Tidak Tetap terdiri dari perwakilan Universitas Syiah Kuala, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Business Link. Menurut Amendemen Kedua *Forest Conservation Agreement*, Pemerintah Indonesia juga diwakili oleh dua Anggota *Non-Voting*: seorang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan seorang dari Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, *Oversight Committee* dibantu oleh *Oversight Committee Technical Members* (OCTM) yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, USAID, KEHATI, dan CI. Selain itu, Direktur Eksekutif KEHATI berperan sebagai sekretaris *Oversight Committee*.



Gambar 10. Struktur organisasi TFCAs-Sumatera

Administrator TFCA Sumatera terdiri dari anggota staf sebagai berikut:

1. *Program Director* (Direktur Program)
2. *Grant and General Administration Manager* (Manajer Hibah dan Administrasi Umum)
3. *Landscape and Species Conservation Manager* (Manajer Konservasi Bentang alam dan Spesies)
4. *Communication and Outreach Officer* ((Manajer Komunikasi dan Outreach)
5. *Institutional Development and Monitoring and Evaluation Officer* (Staf Pengembangan Kelembagaan dan Monev)
6. *Finance Officer* (Staf Keuangan)
7. *Secretary and General Program Support* (Sekretaris dan Dukungan Program)
8. *Grant Administration Assistant* (Asisten Administrasi Hibah)
9. *Landscape Conservation Assistant* (Asisten Konservasi Bentang alam)
10. *Species Conservation Assistant* (Asisten Konservasi Spesies), dan
11. *Database and Information System Assistant* (Asisten Basis Data dan Sistem Informasi)

7.3. Fasilitator Wilayah

Implementasi pemberian hibah TFCA-Sumatera telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun setelah pencairan hibah pertama pada kuartal pertama tahun 2011. Saat ini, TFCA Sumatera mengelola 22 penerima hibah dari empat siklus hibah yang sebagian besar terdiri dari hibah besar (lebih dari Rp 5 Miliar). TFCA Sumatera saat ini dihadapkan pada tingginya beban kerja dalam monitoring dan evaluasi (monev), termasuk pencatatan perkembangan penerima hibah. Dengan anggaran yang terbatas, Administrator tidak cukup fleksibel untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian hibahnya agar dapat mengerjakan administrasi hibah termasuk MONEV, pembangunan kapasitas, dan pekerjaan administratif lainnya.

Tentang ini, *Oversight Committee* setuju untuk mengembangkan fasilitator wilayah melalui pemusatan hibah pada beberapa area penting sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan bantuan proyek pada penerima hibah untuk pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan TFCA. Aspek terpenting dalam pengelolaan proyek adalah monitoring, evaluasi, dan pemberian pembantuan lainnya untuk perbaikan kekeliruan.

- b. Meningkatkan efektivitas para penerima hibah dalam membangun kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi, mengingat pemerintah dan sektor swasta memegang peran penting dalam konservasi hutan.
- c. Meningkatkan kapasitas organisasi dan staf para penerima hibah untuk implementasi proyek yang efektif. Kedepannya, selain membangun kapasitas administratif, para penerima hibah harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keahlian teknis yang berhubungan dengan pekerjaan mereka di lapangan.
- d. Meningkatkan probabilitas kesuksesan dan keberlangsungan program melalui pengadaan bantuan teknis untuk para penerima hibah dalam hal-hal sosioekonomi, bisnis sosial, dan *project exit strategy*.

Fasilitator wilayah akan mendampingi penerima hibah dalam mencapai tujuan proyek secara efektif dan, pada saat yang bersamaan, mendampingi Administrator dalam menjalankan monitoring dan evaluasi serta pembangunan kapasitas internal secara intensif. Fasilitator wilayah juga harus memfasilitasi penerima hibah dalam pengembangan perencanaan exit strategy dan pelaksanaannya.

Fasilitator wilayah akan berbasis di tiga lokasi: Medan, Pekanbaru dan/atau Palembang/Jambi. Mengingat perwakilan-perwakilan ini dirancang secara spesifik untuk berkonsentrasi dan memantau penerima hibah secara intensif dari waktu ke waktu, mereka harus memastikan bahwa tidak ada masalah yang berulang dalam pengelolaan proyek. Mereka juga harus dapat menyediakan bantuan dan solusi yang dihadapi oleh penerima hibah. Fasilitator wilayah juga harus dapat menjalankan tugas-tugas lain dalam hal pembangunan kapasitas dan pemberian kemudahan bagi keberlangsungan proyek.

Dalam memenuhi tujuan-tujuan di atas, fasilitator wilayah memiliki setidaknya tiga tugas berikut:

1) Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Kapasitas

Kewajiban utama fasilitator wilayah di bawah payung aktivitas ini adalah menjalankan monev rutin dan memberikan masukan langsung serta solusi saat penerima hibah mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya. Fasilitator wilayah harus, secara aktif, menciptakan strategi untuk membangun kapasitas kelembagaan penerima hibah dari waktu ke waktu. Fasilitator harus menganalisa kebutuhan pembangunan kapasitas penerima hibah dan harus memiliki staf yang berpengalaman dalam monitoring dan evaluasi proyek, pemberian bantuan, dan pemberian solusi inventif untuk masalah-masalah program maupun organisasi.

2) Koordinasi dan Penghubung Para Pihak

Di sini, fasilitator wilayah akan mempunyai tanggung jawab utama untuk memfasilitasi atau menunjang koordinasi, komunikasi dan untuk menghubungkan antara Administrator dan penerima dana dengan stakeholder yang terkait, terutama Pemerintah (UPT Kemenhut dan pemerintah setempat) dan badan-badan swasta. Tugas-tugas ini penting untuk membentuk proses pembelian oleh seluruh stakeholder pada proyek konservasi dan dampak jangka panjangnya.

3) Peningkatan Kapasitas

Fasilitator wilayah akan mengkoordinir untuk menyediakan peningkatan kapasitas untuk penerima dana sebagaimana dibutuhkan. Salah satu topik yang penting adalah kewirausahaan sosial (*social entrepreneur*) dan pengembangan strategi keluar yang harus tertanam dalam proyek sejak perancangannya. Para fasilitator wilayah hendaknya bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan dalam pengembangan perusahaan sosial untuk penerima dana berhubungan dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat, contohnya melalui pengembangan usaha, pemasaran produk dan pengelolaan usaha yang terkait. Selain itu, para fasilitator wilayah juga hendaknya dapat membimbing penerima dana dalam mengembangkan strategi keluar dan kesinambungan proyek setelah tunjangan TFCA habis. Peningkatan kapasitas adalah bagian dari pengembangan kelembagaanonal bagi para penerima dana. Para penerima dana yang baru akan dibimbing dengan rancangan proyek dan pelatihan finansial (termasuk pembukuan). Pelatihan *in-house* dalam urusan teknis dilakukan secara terus-menerus selama hibah diberikan, terutama mengenai perbaikan temuan kesalahan pada saat monitoring dan evaluasi. Administrator juga melakukan kegiatan belajar bersama secara berkala di mana salah seorang penerima dana berbagi cerita sukses kepada penerima dana lainnya sebagai contoh pelajaran yang mungkin dipelajari.

7.4. Rencana Kerja dan Jadwal

Kegiatan yang dirangkum dalam kerangka logis (Tabel 4) diuraikan secara detil dalam rencana kerja dan jadwal kegiatan. Rencana kerja dan pelaksanaan jadwal dari rencana strategis ini tertera pada tabel di Lampiran 1.

7.5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pencatatan sistematis melalui pengamatan, pengumpulan informasi, analisis, dokumentasi, refleksi, dan tindakan (termasuk perencanaan ulang).

Monitoring dilakukan pada setiap tingkat proyek (program), termasuk penerima dana, fasilitator wilayah, Administrator, *Oversight Committee* dan evaluator eksternal. Pada akhir setiap kegiatan monitoring, harus ada pertemuan akhir untuk menyetujui tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh penerima dana. Sangatlah penting untuk memantau lebih jauh bahwa perjanjian mengenai tindakan perbaikan tersebut benar-benar dilaksanakan. Hasil dari monitoring tersebut adalah sebuah laporan yang juga mencakup perjanjian mengenai tindakan perbaikan dengan tenggat waktu finalisasi dan informasi lainnya yang digunakan untuk evaluasi.

Evaluasi adalah penentuan sistematis mengenai jasa, nilai, dan signifikansi subjek menggunakan kriteria yang diatur oleh standard yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu memastikan tingkat pencapaian atau nilai mengenai tujuan dan hasil dari tindakan apapun yang telah dilakukan. Tujuan utama dari evaluasi, selain daripada mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai usaha yang terdahulu, adalah untuk memungkinkan kegiatan refleksi dan membantu dalam identifikasi perubahan yang akan datang. Oleh sebab itu, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memprediksi, dan menentukan kualitas atau nilai proyek guna mengambil keputusan dengan lima pertanyaan evaluasi yang strategis:

- **Hubungan:** Bagaimana tujuan intervensi konsisten dengan kebutuhan penerima manfaat dan kebijakan rekan dan donor.
- **Efektifitas:** Apakah kita melakukan hal yang benar?
- **Efisiensi:** Apakah kita melakukannya dengan benar?
- **Keberlanjutan:** Apakah proyek ini (atau tujuan dari proyek ini) akan berkelanjutan setelah intervensi berakhir?
- **Dampak:** Apakah dampak positif/negatif, langsung/tidak langsung dari pengembangan intervensi ini?

Evaluasi TFCA-Sumatera dilakukan secara internal oleh penerima dana, fasilitator wilayah, Administrator, atau evaluator eksternal, dengan tujuan utama sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa penerima dana telah memenuhi kewajiban mereka. Hal ini mencakup penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana sejalan dengan rencana kerja dan perjanjian;

- a. Untuk memastikan bahwa penerima dana telah memenuhi kewajiban mereka. Hal ini mencakup penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana sejalan dengan rencana kerja dan perjanjian;
- b. Untuk terus menilai keefektifan dan sangkut paut terhadap pendekatan dan isi program guna mendapatkan umpan balik mengenai pengembangan kebijakan pemberian hibah dan/atau untuk meninjau kembali proposal hibah di masa yang akan datang;
- c. Untuk merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mengikuti hasil monitoring, yang dapat menyebabkan keputusan untuk tidak meneruskan sebuah hibah;
- d. Untuk menilai dampak program.

OC memiliki kemungkinan untuk meminta evaluasi dalam program TFCA untuk menilai pencapaian tujuan utama sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis, sejalan dengan FCA 6.7.1.r (ii).

7.6. Dokumentasi Pelaporan dan Pencapaian Lain

7.6.1. Laporan oleh Mitra

Para penerima dana hibah diwajibkan untuk menyerahkan laporan bulanan mengenai kedudukan finansial mereka. Laporan triwulanan dan dua kali setahun juga harus dikirim kepada Administrator mengenai kemajuan, pencapaian, dan tantangan dalam pelaksanaan proyek. Laporan dalam bentuk narasi harus diserahkan oleh mitra mengenai kemajuan finansial dan program mereka dalam basis tahunan. Laporan akhir pada penghujung proyek juga harus diserahkan. Pedoman dalam melaporkan telah dibuat oleh Administrator dengan memungkinkan peninjauan kembali dan penyesuaian.

7.6.2. Laporan oleh Administrator

Administrator memiliki kewajiban kepada OC untuk menyerahkan laporan setiap dua kali setahun mengenai kemajuan pemberian hibah, dan laporan tahunan naratif mengenai kedudukan dana perwalian, kemajuan pemberian hibah dan kemajuan finansial. Laporan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 45 hari setelah 1 Mei dan 1 November, berisi perkembangan status keuangan dan kegiatan program para mitra dalam format yang ditabulasikan. Selain itu, laporan tahunan harus diserahkan dalam bentuk narasi tidak lama setelah akhir setiap tahun.

Setiap tahun pada bulan Februari, Administrator juga wajib menyerahkan Laporan Kongres kepada Kongres AS melalui kantor USAID, Washington DC. Laporan ini berisikan kemajuan pemberian hibah selama lima tahun terakhir dan narasi singkat mengenai capaian. Bersama dengan laporan kepada Kongres, Administrator juga hendaknya mengirimkan dua atau tiga cerita sukses mengenai kegiatan konservasi.

7.6.3. Pencapaian Lainnya

Administrator telah menghasilkan publikasi dan pembelajaran dari pemberian hibah TFCA dalam bentuk pedoman lapangan, buku-buku mengenai cerita sukses dan praktik terbaik, arahan kebijakan dan laporan-laporan. Hal-hal tersebut antara lain berupa bahan tercetak, elektronik, dan laporan media seperti koran dan rekaman acara TV.

7.7. Strategi Komunikasi dan Outreach yang dijalankan oleh Program TFCA-Sumatera

Sebagai bagian dari tata kelola TFCA-Sumatera, komunikasi dan outreach harus dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan masyarakat luas pentingnya tindakan konservasi di Sumatra dengan meningkatkan kebilangan program TFCA, memberitahu pemegang kendali yang terkait dan membantu permintaan dukungan untuk program tersebut.

Program komunikasi TFCA dilaksanakan sebagai bagian dari strategi komunikasi KEHATI yang lebih besar dan dengan program-program lain di bawah inisiatif KEHATI. Oleh daripada itu, komunikasi tidak hanya ditujukan kepada masyarakat di Sumatra namun juga kepada masyarakat yang lebih luas dalam taraf nasional atau global.

Tujuan dari strategi komunikasi TFCA-Sumatera antara lain:

1. Untuk meningkatkan informasi pelaksanaan program dan untuk memberitahu masyarakat umum (publik) tentang program ini;
2. Untuk menyediakan informasi pada pemangku kepentingan tertentu dan meminta dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Untuk mendokumentasi dan berbagi pelajaran dari pelaksanaan program;
4. Untuk mengembangkan rekomendasi dan arahan kebijakan kepada pemerintah setempat dan nasional atau sektor swasta sebagaimana sesuai;

Strategi yang digunakan akan merupakan strategi yang berbasis kelompok sasaran dan memiliki tujuan khusus. Strategi tersebut akan memastikan bahwa kegiatan komunikasi didasari oleh kebutuhan setiap kelompok sasaran dan ditentukan oleh tujuan komunikasi kepada mereka. Setiap audiens membutuhkan informasi yang berbeda, menggunakan media yang berbeda, dan pada frekuensi yang berbeda. Bahasa dan kompleksitas dari pesan juga harus dibedakan berdasarkan tipologi dari masing-masing target audiens.

Sasaran dari strategi komunikasi ini adalah program TFCA akan didukung dengan baik oleh masyarakat luas dan ditingkatkan dengan menarik perhatian donor lain.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, berikut ada kegiatan umum yang akan dilaksanakan:

1. Untuk meningkatkan informasi pelaksanaan program dan untuk memberitahu masyarakat luas (publik) tentang program ini. Dengan paparan (expose) yang meningkat, Program TFCA lebih dikenal dan kegiatannya akan dipublikasikan dengan baik di media nasional dan setempat. Hal ini penting untuk menunjukkan eksistensi TFCA dan kegiatan mereka kepada publik. Pengembangan, pengelolaan, serta perbaruan situs web akan menjadi alat komunikasi utama sebagai media yang paling terlihat dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Bahan-bahan lainnya akan berupa *press release*, siaran TV, publikasi utama, iklan, film pendek, dan alat-alat komunikasi seperti brosur, leaflet, dan *merchandise*. Sasarannya adalah setidaknya 24 kutipan setahun akan dimuat di berbagai media. Hal ini akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan, pengelolaan, dan perbaruan situs web
 - b. *Workshop* dan tur jurnalis
 - c. Menyertakan program TFCA dalam acara-acara special TV atau media lainnya dengan cara membentuk kerjasama dengan media tersebut
 - d. *Press release*
 - e. Konferensi pers mengenai isu-isu tertentu
 - f. Penulisan utama dan opini
 - g. Penempatan iklan
 - h. Produksi film pendek
 - i. Produksi alat-alat komunikasi (brosur, leaflet, buku, kalender, *merchandise*)

2. Untuk menyediakan informasi pada pemangku kepentingan tertentu dan meminta dukungan dari pihak-pihak terkait. Pemerintah, donor, dan perusahaan swasta dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program konservasi secara langsung. Organisasi-organisasi juga dapat mendukung dan meningkatkan program TFCA melalui, contohnya, dana pendamping, melaksanakan proyek atau kegiatan tambahan dan mengambil alih program setelah TFCA menyelesaikan kegiatan mereka sebagai bagian dari menjadi kesinambungan program. Beberapa dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. FGD with dengan LSM dalam tingkat nasional dan setempat
 - b. FGD dengan pemerintah
 - c. FGD dengan akademisi
 - d. Pertemuan dengan mitra strategis
 - e. Dengar pendapat dengan pemerintah nasional dan setempat
 - f. Melobi sektor bisnis
 - g. Dengar pendapat dengan donor
 - h. pengembangan proposal untuk peningkatan program
3. Untuk mendokumentasi dan berbagi pelajaran dari pelaksanaan program. Penerima dana dari TFCA-Sumatera memiliki banyak cerita sukses yang harus didokumentasikan dan dibagi bersama penerima dana lainnya dan para pemegang kendali sebagai pelajaran dan dalam beberapa kasus dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan yang sama atau serupa. Kegiatan tersebut mencakup:
 - a. Mendokumentasikan cerita sukses
 - b. Pengembangan pedoman lapangan
 - c. Penerbitan cerita sukses.
4. Untuk mengembangkan rekomendasi dan arahan kebijakan kepada pemerintah nasional dan setempat atau sektor swasta yang relevan. Sejalan dengan pelajaran dari pelaksanaan program TFCA-Sumatera dan mengenali dan mengacu kepada program lain dalam konservasi, penting untuk menyediakan rekomendasi untuk arah kebijakan kepada pemerintah setempat atau nasional untuk memungkinkan perbaikan dalam kebijakan konservasi. Selain itu, ada pula pelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan swasta untuk menjalankan praktik pengelolaan terbaik. Kegiatan tersebut mencakup:

- a. Berbagai workshop dan pertemuan
- b. Pengembangan bahan kebijakan, termasuk makalah, rencana proyek, dll.

Sejalan dengan *Forest Conservation Agreement*, Administrator diwajibkan untuk menghasilkan laporan semi-tahunan dan tahunan. Selain daripada itu, TFCA-Sumatra melalui USAID juga harus menyerahkan laporan kongres tahunan. Laporan-laporan ini dapat, dalam taraf tertentu, beberapanya dapat diakses oleh masyarakat publik.

Pembagian bahan komunikasi akan dilakukan melalui seluruh metode yang ada, termasuk memasang *post* pada situs web, menyelenggarakan diskusi dan pertemuan, panggilan resmi atau komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, siaran TV dan radio, media sosial dan koran atau majalah.

Lampiran 1. RENCANA KERJA DAN JADWAL

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
Dampak Konservasi: 2 juta ha hutan (termasuk kawasan lindung) dikelola dengan efektif dan atau terlindungi								
Komponen 1: Penguatan Kebijakan dan KELEMBAGAAN KONSERVASI								Hasil yang diharapkan: 2 juta ha hutan (termasuk kawasan lindung) dikelola dengan efektif dan atau terlindungi ²
Objektif 1: Penguatan kelembagaan dan kebijakan di seluruh tingkatan administratif dan pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan dan spesies terancam punah dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan	Mengembangkan rencana tata ruang ramah lingkungan dan atau kebijakan pembangunan berbasis ekologis	X			X			Perda atau KLLS atau RTRW disahkan
	Mengusulkan kawasan konservasi baru atau memperluas yang telah ada					X		1. proposal untuk pendirian kawasan konservasi baru atau 1. proposal untuk memperluas kawasan konservasi yang telah ada diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan lindung/konservasi			X	X	X	X	5 Rencana Pengelolaan (RP) kawasan konservasi dikembangkan
			X	X	X	X	X	Sekurang-kurangnya 12 Balai Taman Nasional/Balai KSDA terlatih/perselnya
	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan kehutanan	X				X		3 kemitraan kolaboratif yang telah ada dapat terjaga, berdiri 1 kemitraan baru
	Implementasi praktik pengelolaan terbaik (BMP) oleh sektor swasta							Setidaknya 2 implementasi baru dari perusahaan untuk menjalankan BMP, HCVF / BBOP / sertifikasi / teribat / memberikan dukungan kepada aktivitas konservasi (termasuk restorasi hutan, konservasi spesies, mitigasi konflik satwa-manusia)
	Implementasi rencana pembangunan desa partisipatif	X	X	X	X	X	X	5 rencana pembangunan desa
	Implementasi skema pengelolaan kawasan lindung berbasis resor (RBM)		X		X			2 RBM dikembangkan dan diimplementasikan

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
	Advokasi dan mengembangkan kebijakan/peraturan/panduan bagi konservasi dan perlindungan hutan/habitat dan spesies	X	X	X	X	X	X	5. kebijakan yang mendukung konservasi disahkan
	Mengembangkan rencana aksi konservasi spesies	X	X	X				4. rencana aksi konservasi spesies dikembangkan
	MISSING	X	X	X	X	X	X	Tidak ada tanda-tanda perubahan dan perdagangan satwa liar terdeteksi (diukur melalui jumlah temuan jerat dll.)
	Implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat	X	X	X	X	X	X	Minimal 5 unit atau 1,000 ha PHBM dikembangkan dan sekurangnya 30 unit atau 50,000 ha PHBM yang telah ada ditingkatkan pengelolannya
Komponen 2: MEMPERKUAT KONSERVASI KAWASAN HUTAN								<i>Hasil yang diharapkan: berkontribusi minimal 10% terhadap penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan di bentang alam prioritas</i>

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
Objektif 2. Penguatan praktik dan intervensi pada pengelolaan di tingkat bentang alam untuk menjaga, melindungi dan meningkatkan fungsi ekologis hutan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan melakukan restorasi ekologis kawasan hutan yang terdegradasi	Implementasi skema restorasi ekosistem	X	X	X	X	X	X	Minimal 500 ha kawasan restorasi hutan yang telah ada terpelihara, sekurangnya 300 ha hutan terdegradasi dapat direstorasi, dan 20.000 ha lahan kritis (bukan hutan) direhabilitasi
	Memperkuat perlindungan kolaboratif di kawasan hutan atau kawasan lindung	X	X	X	X	X	X	Minimal 800.000 ha kawasan lindung diamankan
	Melakukan penataan batas partisipatif	X						Finalisasi tata batas minimal 2 kawasan lindung
	Implementasi praktik pengelolaan terbaik pada hutan industri		X				X	Minimal ada 2 perusahaan konsesi menerapkan sertifikasi BMP, HCVR, atau BBOP.

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020	
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020		
Komponen 3: MEMPERTAHANKAN DAN Mendukung Keberadaan Populasi dan viable population spesies terancam punah dalam jangka panjang							Hasil yang diharapkan: 1. Setidaknya 800.000 ha habitat spesies terancam punah dapat diamankan, dimana terdapat viable population harimau, badak, orangutan dan gajah. 2. Penurunan sebesar 50% angka kehilangan populasi harimau, badak, orangutan dan gajah dan stabilisasi keberadaan viable population di wilayah geografis masing-masing		
		Implementasi skema pengelolaan, perlindungan dan restorasi habitat dan ekosistem	X		X	X	X	X	X
	Objektif 3. Memastikan populasi satwa kunci terancam punah Sumatra dapat bertahan dan keberadaan viable population dalam jangka panjang, termasuk Harimau Sumatra (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Badak Sumatra (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>), Gajah Sumatran (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) dan Orangutan Sumatra (<i>Pongo abelii</i>)								

OBJEKTIF UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						TARGET DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
	Mengembangkan dan mempertahankan konektivitas habitat dan ekosistem (<i>wildlife corridor</i>)	X	X	X	X	X	X	Minimum 3000 ha koridor satwa dapat dipertahankan
	Implementasi pengelolaan populasi spesies terancam punah		X	X	X	X	X	Setidaknya, populasi spesies terancam punah yang ada saat ini (<i>base/line</i> berdasarkan dokumen Kementerian 2007) dapat dipertahankan, antara lain: harimau di 5 bentang alam, badak di 3 bentang alam, orangutan di 3 bentang alam dan gajah di 5 bentang alam.
	Eradikasi spesies invasif		X					Sekurangnya 100 ha kawasan dengan spesies invasif dapat dilakukan eradikasi
	Mitigasi konflik manusia-satwa	X	X	X	X	X	X	Penurunan angka konflik manusia-satwa sekurangnya sebesar 10% di 3 bentang alam (baseline 2014)
	Mendirikan atau meningkatkan fasilitas konservasi ex-situ (termasuk kebun binatang, fasilitas pembalihan dan		X	X	X			Minimal 1 fasilitas konservasi/pembalihan ex-situ dapat ditingkatkan

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
Komponen 4: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL							Hasil yang diharapkan: 1. Peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 10% (setiap tahun) di beberapa kawasan target 2. Sekurangnya 10 kelompok masyarakat meningkat kapasitasnya dalam bidang ekonomi, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif terhadap konservasi	
	Objektif 4. Memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan, serta merancang insentif untuk keterlibatan dalam konservasi, perlindungan dan pengelolaan hutan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam kegiatan konservasi	Meningkatkan kesadaran dan outreach	X	X	X	X	X	X

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
	Implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat	X	X	X	X	X	X	Minimal 10 kelompok PHBM meningkat kapasitasnya dalam menjalankan organisasi dan pengelolaan teknis
	Meningkatkan praktik ekonomi hijau, termasuk wanatani, pertanian organik, HHBK, jasa lingkungan dan ekowisata	X	X	X	X	X	X	Peningkatan sebesar minimal 10% pendapatan rumah tangga (baseline 2014)
		X	X	X	X	X	X	Minimal 20 koperasi / lembaga pembiayaan mikro didirikan/ditingkatkan kapasitasnya
		X	X	X	X	X	X	Minimal 30 perusahaan swasta terlibat dalam hal pemasaran dan penyaluran produk masyarakat
		X	X	X	X	X	X	Sekurangnya 250 kelembagaan ekonomi lokal mendapatkan bantuan dalam meningkatkan sistem produksinya (wanatani, kelompok tani, kerajinan, perikanan, koperasi, kelompok usaha bersama)

TUJUAN UTAMA	KEGIATAN	JADWAL						SASARAN DAN INDIKATOR 2020
		Y-1 2015	Y-2 2016	Y-3 2017	Y-4 2018	Y-5 2019	Y-6 2020	
		X		X	X	X	X	Minimal 20 kelompok menerapkan skema jasa lingkungan (Ecowisata, Pico / Micro hydro, jasa air komersial, etc.)
	Penyadartahuan, pendidikan dan outreach untuk kegiatan konservasi	X		X	X	X	X	Setidaknya 2 Jurnal ilmiah, 3 buku dan 12 film diproduksi dan dipublikasi
		X		X	X	X	X	Sekurangnya 10 sekolah mengadopsi model pendidikan konservasi keanekaragaman hayati



TFCA-SUMATERA

Jl. Bangka VIII No.3B Pela Mampang
Jakarta 12720-INDONESIA
Tel: +(62-21) 719 9953; 719 9962
Fax: +(62-21) 719 6530
twitter: @tfcasumatera
e-mail: tfcasumatera@tfcasumatera.org
www.tfcasumatera.org